

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kami dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016 sebagai perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah, yang menuntut setiap unit kerja agar menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Bidang Tugas dan Fungsi, kewenangan dan peran serta tanggung jawabnya dalam pembangunan masyarakat, wilayah dan Pemerintah Daerah Majene untuk menuju terwujudnya Visi Daerah yaitu :

**“TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA”**

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene merupakan rangkaian rencana kegiatan dan program yang mendasar untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene dalam rangka melaksanakan kebijakan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Majene serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar dapat mencapai hasil kerja yang optimal sehingga dapat memberikan kontribusi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Majene sesuai dengan Visi Daerah untuk terwujudnya Misi Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat digunakan sebagai landasan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene dalam rangka membantu kelancaran pembangunan di daerah menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Majene, 02 April 2012

Kepala Dinas Perhubungan  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Majene

**SYAMSUDDIN, SE**

Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19551010 198501 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I       PENDAHULUAN .....	3
1.1     Latar Belakang .....	3
1.2     Landasan Hukum .....	8
1.3     Maksud dan Tujuan .....	9
1.4     Sistematika Penulisan .....	11
BAB II       GAMBARAN PELAYANAN SKPD .....	12
2.1     Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD .....	12
2.2     Sumber Daya SKPD .....	27
2.3     Kinerja Pelayanan SKPD .....	31
2.4     Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	40
BAB III      ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .....	41
3.1     Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	41
3.2     Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih .....	54
3.3     Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota .....	58
3.4     Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	62
3.5     Penentuan Isu-Isu Strategis .....	63
BAB IV      VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN ....	64
4.1     Visi dan Misi SKPD .....	64
4.2     Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD.....	64
4.3     Strategi dan Kebijakan SKPD .....	65
BAB V       RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF .....	67
BAB VI      INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD .....	75
BAB VII     PENUTUP .....	79

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika bertujuan untuk meningkatkan pelayanan jasa transportasi, komunikasi dan teknologi informasi secara efektif, efisien, handal, berkualitas, aman dan terjangkau serta mewujudkan sistem transportasi, komunikasi dan teknologi informasi dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi dengan meningkatkan jaringan perkotaan dan pedesaan yang memadai.

Perkembangan sektor transportasi selama lima tahun terakhir telah memperlihatkan kemajuan. Hal ini terlihat dari mobilitas manusia dan pergerakan barang di hampir seluruh wilayah Kabupaten Majene. Masyarakat, baik yang berdiam di wilayah pegunungan maupun yang berdiam di wilayah pesisir telah melakukan interaksi dengan sesama manusia di luar lingkungannya maupun ke pusat-pusat distribusi yang ada.

Peningkatan pelayanan angkutan darat di Kabupaten Majene mengalami kemajuan yang cukup memadai dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan sarana dan prasarana penunjang setiap tahun yakni Peningkatan Pembangunan Terminal Induk Majene tipe B yang sudah mengalami kemajuan, dan sarana pendukung lain berupa Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor. Pos-Pos LLAJ yang berfungsi melayani Retribusi Kendaraan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta Terminal Pembantu tipe C yang melayani Kendaraan Angkutan Pedesaan (Angdes). Seiring dengan itu, jumlah Kendaraan Umum yang beroperasi dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan.

Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan juga semakin baik, ini terbukti dari semakin banyaknya pemilik / pengemudi yang memeriksa persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraannya melalui Pengujian Kendaraan Bermotor.

Disamping itu pemerintah juga telah melengkapi sarana pendukung lain yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan serta ketertiban pengguna jalan berupa pemasangan nama-nama jalan dan rambu-rambu jalan yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Majene, Pembangunan Pos Keamanan Jalan Raya (PKJR) di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Malunda. Serta Pemasangan Traffic Light sebanyak 4 (empat) unit yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Majene dan 2

(dua) unit oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, semuanya terpasang di dalam Kota Majene. Berikut data-data kondisi saat ini :

Tabel  
Data Kondisi Jalan  
Kab. Majene Tahun 2011

No.	Kondisi Jalan	Panjang	Ket.
1	2	3	4
1.	Jalan Aspal	322 km	
2.	Jalan Kerikil	35 km	
3.	Jalan Tanah	66 km	
<b>Jumlah</b>		<b>432 km</b>	

Tabel  
Data Kendaraan Angkutan Barang  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Kendaraan Angkutan Barang	Banyak	Ket.
1	2	3	4
1.	Pick Up	209 unit	
2.	Pick Up Box	3 unit	
3.	Truck Roda 4	10 unit	
4.	Truck Roda 6	101 unit	
5.	Truck Roda 10	8 unit	
6.	Truck Roda 14	1 unit	
<b>Jumlah</b>		<b>332 unit</b>	

Tabel  
Data Kendaraan Angkutan Penumpang Umum  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Kendaraan Angkutan Penumpang Umum	Banyak	Ket.
1	2	3	4
1.	Bus Cepat	8 unit	
2.	Bus Lambat	14 unit	
3.	Minibus (Panther/Kijang)	48 unit	
4.	Mikrolet	173 unit	
<b>Jumlah</b>		<b>243 unit</b>	

Tabel  
Data Terminal Penumpang Angkutan Darat  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Terminal Penumpang	Lokasi	Banyak	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Terminal Induk Tipe B	Ling. Lutang	1 unit	
2.	Terminal Pembantu Tipe C	Ling. Battayang	1 unit	
<b>Jumlah</b>			<b>2 unit</b>	

Tabel  
Data Pos-Pos LLAJ  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Pos Keamanan	Lokasi	Banyak	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Pos Keamanan Jalan Raya	Kec. Banggae Kec. Banggae Timur Kec. Malunda	1 unit 1 unit 1 unit	
2.	Pos Retribusi	Kec. Banggae Kec. Banggae Timur	1 unit 1 unit	
<b>Jumlah</b>			<b>5 unit</b>	

Tabel  
Data Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Uraian	Lokasi	Banyak	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Traffic Light	Kec. Banggae Kec. Banggae Timur	3 unit 3 unit	2 unit dianggarkan oleh APBD Prov. Sulbar
2.	Warning Light	Kec. Banggae Kec. Banggae Timur	3 unit 1 unit	
<b>Jumlah</b>			<b>10 unit</b>	

Pengembangan sektor pelayanan transportasi laut pada tahun 2011 khususnya pelayanan rakyat masih berada pada tahap pembinaan dan pembenahan, hal itu disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperbaharui kelengkapan surat-surat kapal, khususnya masyarakat pemilik kapal yang beroperasi dengan Tonase GT-7 Kebawah.

Tabel  
Data Kapal GT-7 Kebawah  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Jenis Kapal	Banyak	Ket.
1	2	3	4
1.	Kapal Layar Motor GT-1	68 unit	
2.	Kapal Layar Motor GT-2	253 unit	
3.	Kapal Layar Motor GT-3	61 unit	
4.	Kapal Layar Motor GT-4	34 unit	
5.	Kapal Layar Motor GT-5	45 unit	
6.	Kapal Layar Motor GT-6	26 unit	
<b>Jumlah</b>		<b>487 unit</b>	

Tabel  
Data Pelabuhan  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Pelabuhan	Banyak	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Pelabuhan Regional Palipi	1 unit	Kec. Sendana	Dikelola oleh Syahbandar Majene
2.	Pelabuhan Banggae	1 unit	Kec. Banggae	
<b>Jumlah</b>		<b>2 unit</b>		

Tabel  
Data Tambatan Perahu  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Tambatan Perahu	Banyak	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Tambatan Perahu Baurung	1 unit	Kec. Banggae Timur	
2.	Tambatan Perahu Pangali-ali	1 unit	Kec. Banggae	
3.	Tambatan Perahu Tanangan	1 unit	Kec. Banggae	
4.	Tambatan Perahu Garo'go	1 unit	Kec. Banggae	
5.	Tambatan Perahu Luaor	1 unit	Kec. Pamboang	
6.	Tambatan Perahu Tinambung	1 unit	Kec. Pamboang	
7.	Tambatan Perahu Labuang	1 unit	Kec. Sendana	
8.	Tambatan Perahu Salabulo	1 unit	Kec. Tubo Sendana	
<b>Jumlah</b>		<b>8 unit</b>		

Pemenuhan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika sebagai akses masyarakat untuk mendapatkan informasi teraktual baik dari dalam negeri maupun luar negeri adalah berupa peningkatan kapasitas dan kelancaran kualitas jangkauan telekomunikasi yang lebih luas sampai ke pedesaan, meski belum didukung regulasi daerah dan penyelenggaraan telekomunikasi yang terpadu. Berikut data sementara dari Bidang Telekomunikasi dan Informatika :

Tabel  
Data Media Komunikasi dan Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Uraian	Banyak	Ket.
1	2	3	4
1.	Usaha TV Kabel	30 buah	Seluruh kecamatan
2.	Radio Pemkab. Majene	1 buah	Mammis FM
3.	Radio Komunitas Pendidikan	1 buah	ICT FM
4.	Radio Swasta	1 buah	Marcony FM
5.	Warung Informasi Masyarakat (WIM)	1 buah	Banggae Timur
6.	Pusat Layanan Informasi Kecamatan (PLIK)	7 buah	7 Kecamatan
7.	Warung Internet (Warnet)	24 buah	2 Kecamatan
8.	Base Tower Station (BTS)	22 buah	Seluruh kecamatan

Rencana strategis yang menggambarkan visi dan misi. Strategi program dan kegiatan daerah di sektor perhubungan, komunikasi dan informatika berfungsi sebagai dokumen perencanaan taktis strategis yang disusun sesuai kebutuhan dengan mengacu pada program pembangunan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang Kabupaten Majene.

Penyelenggaraan pembangunan daerah dengan pemecahan berbagai permasalahan dilakukan secara terencana dan bertahap dengan menggunakan prioritas dan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah pada bidang perhubungan, komunikasi dan informatika diharapkan dapat mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman dan lancar. Serta akses Teknologi Informasi sebagai suatu rangkaian sistem yang bersinergi, efisien dan efektif yang menunjang terselenggaranya pembangunan perekonomian serta diharapkan dapat berdampak positif terhadap aspek-aspek lain.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan Hukum Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, tahun 2005-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kabupaten / Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 Maksud**

Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene disusun dengan maksud untuk menjadi panduan bagi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya selama 5 (lima) Tahun Anggaran mulai Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2016.

#### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene Tahun 2012 – 2016 adalah untuk :

- a. Mendorong terwujudnya visi dan terlaksananya misi Pemerintah Kabupaten Majene.
- b. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap bidang dalam lingkup Dishubkominfo dengan visi dan misi SKPD;

- c. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar seksi dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
- d. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dishubkominfo selama kurun waktu 2012 s/d 2016.

Diagram  
Kerangka Pikir Penyusunan Rencana Strategis  
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012-2016

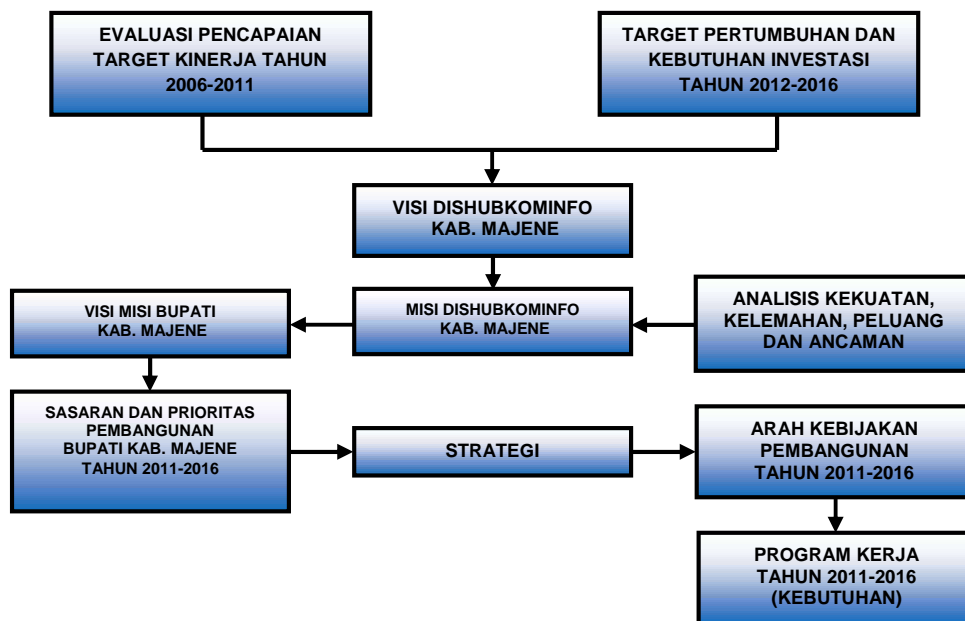
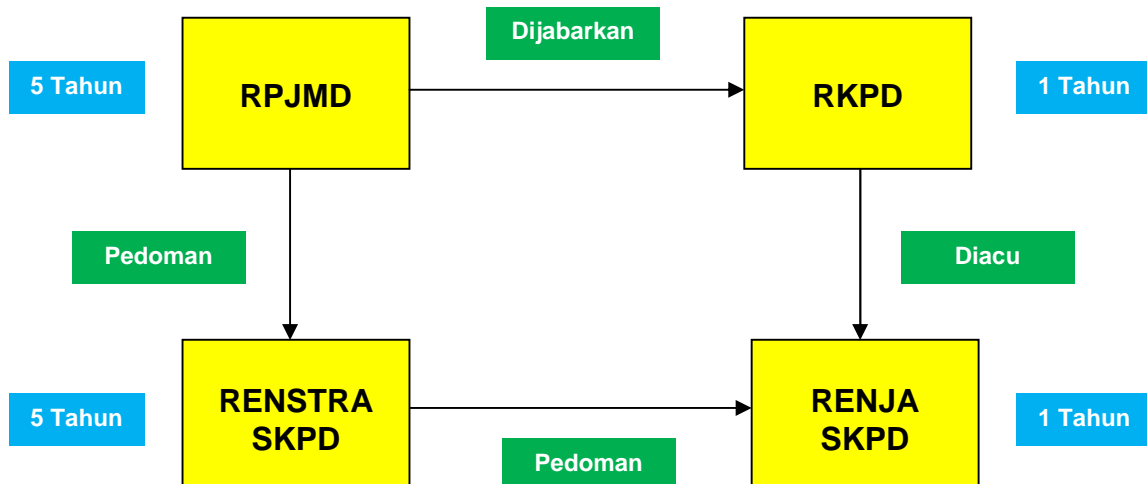


Diagram  
Rencana Strategis SKPD



## **1.4 SISTIMATIKA PENULISAN**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistimatika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN SKPD</b>
2.1	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
2.2	Sumber Daya SKPD
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN</b>
4.1	Visi dan Misi SKPD
4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.2	Strategi dan Kebijakan SKPD
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM, DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF</b>
<b>BAB VI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD</b>

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN SKPD**

#### **2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD**

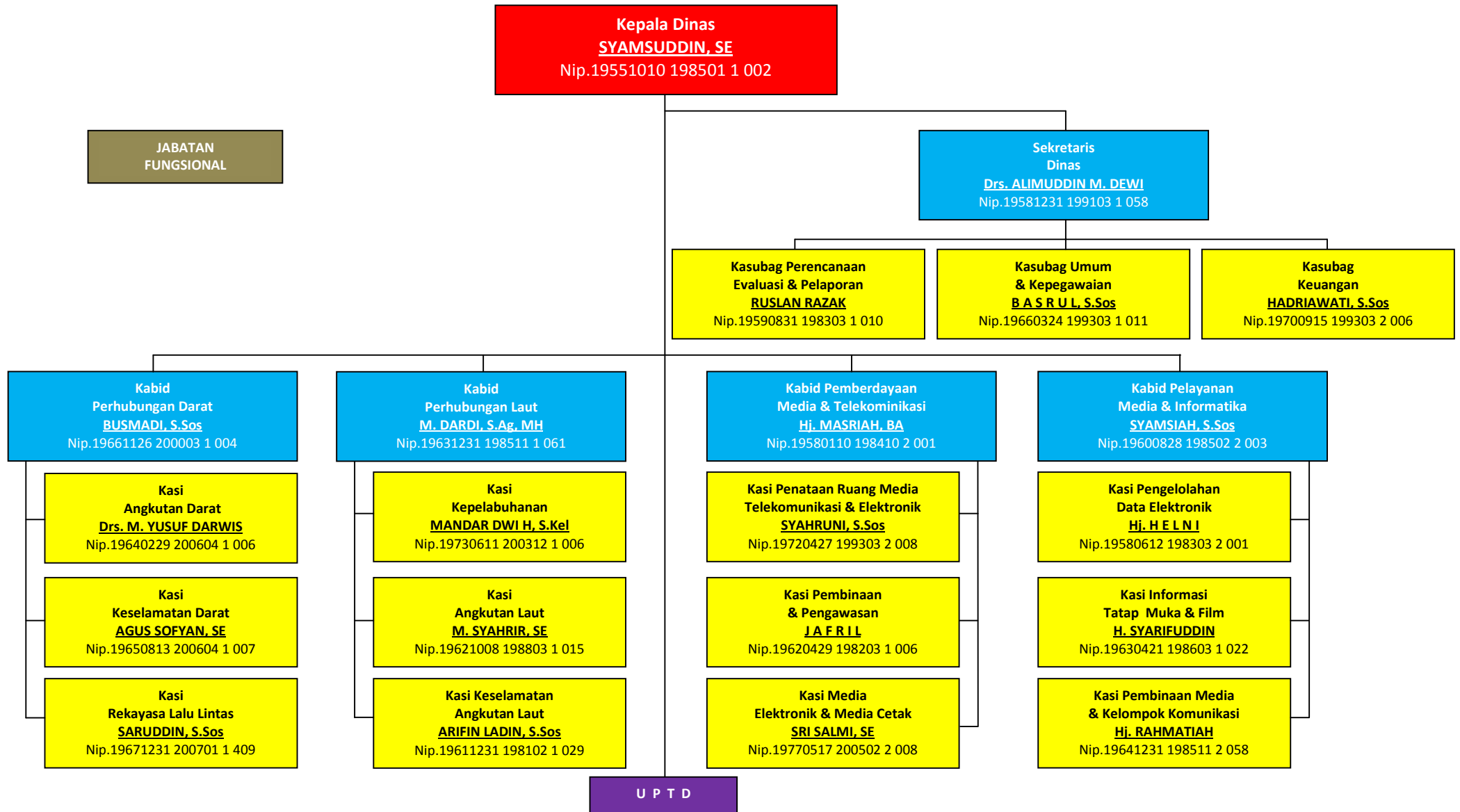
##### **2.1.1 Struktur Organisasi SKPD**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Pasal 101 mengenai Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perhubungan Darat
  1. Seksi Angkutan Darat
  2. Seksi Keselamatan Darat
  3. Seksi Rekayasa Lalu Lintas
- d. Bidang Perhubungan Laut
  1. Seksi Angkutan Laut
  2. Seksi Kepelabuhanan
  3. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran
- e. Bidang Pelayanan Media dan Informatika
  1. Seksi Pengelolaan Data Elektronik
  2. Seksi Pelayanan Informasi
  3. Seksi Pembinaan Media dan Kelompok Komunikasi
- f. Bidang Pemberdayaan Media dan Telekomunikasi
  1. Seksi Penataan Ruang Media Telekomunikasi dan Elektronik
  2. Seksi Media Elektronik dan Media Cetak
  3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Majene sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009

Diagram  
Struktur Organisasi Dishubkominfo Kab. Majene Tahun 2012



## 2.1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Dinas Daerah Kabupaten Majene. Maka Tupoksi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene adalah sebagai berikut:

### Kepala Dinas

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas tugas pokok membantu Kepala Daerah menyelenggarakan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : mengkoordinir, mengarahkan, membimbing, membina dan memberdayakan unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, yang meliputi :
  - a. Perumusan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. Pengorganisasian Renstra, proram kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - c. Pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - d. Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jang panjang, program jangka menengah pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - e. Evaluasi pelaksanaan Resntra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - f. Pelaporan hasil pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- g. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- h. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan daerah.

### **Sekretariat**

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas melakukan koordinasi dan atau memfasilitasi pelaksanaan kewenangan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berhubungan dengan urusan dalam organisasi meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan, pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas, sekretaris mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi unsur manajemen satuan kerja perangkat daerah bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika khususnya urusan dalam, meliputi :
  - a. Bahan penyusunan RKA, DPA, dan dokumen perencanaan perumusan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan, petunjuk operasional dan petunjuk teknis pelaksanaan kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - b. Pelaksanaan, pengorganisasi, pemantauan dan pengendalian kebijakan yang meliputi : bidang umum dan administrasi kepegawaian, penatausahaan keuangan, pelayanan teknis perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara berkala dan periodik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada atasan;
  - d. Pemberian saran dan pertimbangan teknis kepada atasan tentang pelaksanaan Renstra, program kerja tahunan, program jangka panjang dan program jangka menengah kewenangan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

c. Sub Bagian Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Sub Bagian di Sekretariat :

**a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tatalaksana urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, meliputi :
  - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan program dan kegiatan di lingkup dinas;
  - b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkup dinas;
  - c. Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Renstra SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin), LAKIP, LPPD;
  - d. Pengumpulan, pengolahan dan pengkajian data bahan evaluasi dan pelaporan;
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah, serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan urusan rumah tangga dan kepegawaian;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan tata laksana urusan rumah tangga dan kepegawaian, meliputi :
  - a. Penatausahaan surat menyurat, kegiatan pengadaan dan kebutuhan barang, perlengkapan dan tugas umum lainnya.



- b. Administrasi kepegawaian, kearsipan dan protokol, perjalanan dinas.
- c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**c. Kepala Sub Bagian Keuangan**

- 1. Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris menyiapkan, menghimpun dan mengelolah serta melaksanakan urusan dalam organisasi khususnya penatausahaan keuangan ;
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi membantu sekretaris melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi :
  - a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran dinas;
  - b. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang anggaran;
  - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
  - d. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan perintah pembayaran anggaran;
  - e. Pelaksanaan pembukuan dan urusan kas;
  - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Perhubungan Darat**

- 1. Bidang Perhubungan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Perhubungan Darat;
- 2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang perhubungan darat, meliputi :
  - a. Penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan Kabupaten;
  - b. Pemberian perizinan, pelayanan penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan Kabupaten;
  - c. Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan penyusunan jaringan trayek dan penetapan

kebutuhan kendaraan umum kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu Kabupaten;

- d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Darat;
- b. Seksi Keselamatan Darat;
- c. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **a. Kepala Seksi Angkutan Darat**

1. Kepala Seksi Angkutan Darat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang angkutan darat;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Seksi Angkutan Darat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Angkutan Darat, meliputi :
  - a. Pemberian perizinan, pelayanan penyusunan dan penetapan jaringan lalu lintas angkutan barang pada jaringan jalan kabupaten.
  - b. Penetapan kelas jalan kabupaten dan pemberian izin trayek angkutan pedesaan / angkutan kota yang wilayah pelayanannya dalam satu wilayah kabupaten.
  - c. Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan parkir untuk umum;
  - d. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kabupaten;
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### **b. Kepala Seksi Keselamatan Darat**

1. Kepala Seksi Keselamatan Darat, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di Bidang Keselamatan Darat;

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Seksi Keselamatan Darat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di Bidang Keselamatan Darat, meliputi :
  - a. Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan atau yang menjadi isu kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan kabupaten.
  - c. Penetapan dan pengelolaan uji berkala kendaraan bermotor.
  - d. Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangan kabupaten.
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**c. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas**

1. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang keselamatan darat;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Rekayasa Lalu Lintas, meliputi :
  - a. Penetapan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Kabupaten.
  - b. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten.
  - c. Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Kabupaten.
  - d. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap pengguna jalan untuk kepentingan lalu lintas di jalan Kabupaten.
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## **Bidang Perhubungan Laut**

1. Bidang Perhubungan Laut, dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang perhubungan laut :
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang perhubungan laut, meliputi :
  - a. Pengendalian dan pengawasan kegiatan operasional angkutan laut;
  - b. Pengendalian dan mengawasi kegiatan operasional kepelabuhanan;
  - c. Pengendalian dan mengawasi kegiatan operasional keselamatan pelayaran;
  - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

- a. Seksi Angkutan Laut;
- b. Seksi Kepelabuhanan;
- c. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **a. Kepala Seksi Angkutan Laut**

1. Kepala Seksi Angkutan Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang angkutan laut :
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Angkutan Laut mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang angkutan laut, meliputi :
  - a. Penyiapan lokasi kegiatan pelaksanaan angkutan laut dan penyeberangan.
  - b. Penyiapan lokasi kegiatan pelayanan angkutan dan kepelabuhanan.
  - c. Pengaturan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dan ekspedisi muatan kapal laut lainnya.
  - d. Penyediaan fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan dan penyeberangan.
  - e. Penyediaan tenaga kerja bongkar muat.
  - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**b. Kepala Seksi Kepelabuhanan**

1. Kepala Seksi Kepelabuhanan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang kepelabuhanan:
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang kepelabuhanan, meliputi :
  - a. Penyiapan sarana gedung penampungan barang bongkar muat.
  - b. Penyusunan kegiatan pelaksanaan penundaan terhadap pelayanan kapal.
  - c. Penyelenggaraan dan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas laut.
  - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**c. Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran**

1. Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penunjang keselamatan pelayaran;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran, meliputi :
  - a. Penetapan rencana umum jaringan sarana dan prasarana kenavigasian.
  - b. Pemanduan, penundaan kapal, penjagaan dan keselamatan.
  - c. Penetapan standar acuan penunjang keselamatan pelayaran sesuai kewenangannya.
  - d. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bidang Pelayanan Media dan Informatika**

1. Bidang Pelayanan Media dan Informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan media dan informatika.

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Pelayanan Media dan Informatika mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan atau memfasilitasi kegiatan di bidang pelayanan media dan informatika, meliputi :
  - a. Pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media tatap muka, media elektronik dan media cetak.
  - b. Pembinaan terhadap media dan kelompok komunikasi masyarakat.
  - c. Penyiapan fasilitas pengumpulan dan pengolahan data dalam penyusunan program.
  - d. Pemantauan data statistik dan laporan hasil kegiatan.
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pelayanan Media dan Informatika, terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE).
- b. Seksi Pelayanan Informasi.
- c. Seksi Pembinaan Media dan Kelompok Komunikasi.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

#### **a. Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE)**

1. Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan data elektronik (PDE).
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pengelolaan Data Elektronik (PDE) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan data elektronik, meliputi :
  - a. Pengumpulan, mengidentifikasi dan menganalisa data;
  - b. Penyajian data statistik, modal investasi loket;
  - c. Pengklasifikasian dan pengelompokan data berdasarkan jenis, materi dan sifatnya.
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan data elektronik;
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya.
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**b. Kepala Seksi Pelayanan Informasi.**

1. Kepala Seksi Pelayanan Informasi, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Informasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Kepala Seksi Pelayanan Informasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang Pelayanan Informasi, meliputi :
  - a. Pelayanan Informasi melalui penerangan keliling, pemutaran film, ceramah dan diskusi, anjang sana;
  - b. Sosialisasi produk hukum dan kebijakan pemerintah;
  - c. Pelayanan sound sistem;
  - d. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**c. Kepala Seksi Pembinaan Media dan Kelompok Komunikasi.**

1. Kepala Seksi Pembinaan Media dan Kelompok Komunikasi, mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan media dan kelompok komunikasi.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala seksi pembinaan media dan kelompok komunikasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan media dan kelompok komunikasi, meliputi :
  - a. Pembinaan terhadap usaha media elektronik, usaha media luar dan kelompok komunikasi masyarakat;
  - b. Pelaksanaan kajian serta pengumpulan data terhadap aspirasi masyarakat sebagai bahan umpan balik atas kebijakan pemerintah daerah;
  - c. Pengumpulan bahan hasil kajian materi informasi berdasarkan kebutuhan masyarakat;
  - d. Pelaksanaan kegiatan administrasi pemberdayaan kelompok komunikasi masyarakat;
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

## **Bidang Pemberdayaan Media dan Telekomunikasi**

1. Bidang pemberdayaan media dan telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan media dan telekomunikasi;
2. Dalam menyelenggarakan bidang pokoknya, Kepala Bidang Pemberdayaan Media dan Telekomunikasi mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan media dan telekomunikasi, meliputi :
  - a. Pelayanan usaha jasa pos filateli teknologi informasi dan telekomunikasi;
  - b. Pemberian izin dan pengawasan usaha jasa titipan;
  - c. Pemberian izin dan pengawasan penyelenggaraan Instalasi Kabal Rumah (IKR) atau Instalasi Kabal Komunikasi (IKK);
  - d. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabal telekomunikasi dalam satu kabupaten;
  - e. Pemberian izin usaha penetapan tarif izin usaha dan jasa usaha di bidang radio dan televise;
  - f. Pemberian izin usaha penetapan tarif dan jasa usaha di bidang televise labil;
  - g. Pemberian izin jasa usaha pos dan jasa usaha telekomunikasi;
  - h. Pelaksanaan pengujian terhadap alat perangkat pos dan telekomunikasi di daerah;
  - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Pemberdayaan Media dan Telekomunikasi, terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Ruang Media Telekomunikasi & Elektronik;
- b. Seksi Media Elektronik dan Media Cetak;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **a. Kepala Seksi Penataan Ruang Media Telekomunikasi & Elektronik.**

1. Kepala Seksi Penataan Ruang Media Telekomunikasi & Elektronik mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penataan ruang media telekomunikasi dan elektronik.



2. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Penataan Ruang Media Telekomunikasi dan Elektronik mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang penataan ruang media telekomunikasi dan elektronik, meliputi :
  - a. Melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan usaha telekomunikasi dan fasilitas frekuensi radio;
  - b. Pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam kegiatan usaha telekomunikasi;
  - c. Penerbitan izin penyelenggaraan instalasi kabal rumah (IKR);
  - d. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang bersifat lokal;
  - e. Penyelenggaraan khusus dan pemasangan jaringan TV Kabal;
  - f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**b. Kepala Seksi Media Elektronik dan Media Cetak.**

1. Kepala Seksi Media Elektronik dan Media Cetak mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang media elektronik dan media cetak;
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Media Elektronik dan Media Cetak mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang media elektronik dan media cetak, meliputi :
  - a. Penerbitan izin usaha penetapan tarif dan jasa usaha di bidang radio dan televisi;
  - b. Pemberian izin usaha penetapan tarif dan jasa usaha dan pengawasan peredaran film, rekaman video dan sejenisnya;
  - c. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;

**c. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan**

1. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan;

2. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, meliputi :
  - a. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap jasa usaha titipan;
  - b. Pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan filateli;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian izin usaha dan penetapan tarif jasa usaha di bidang radio dan televisi;
  - e. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
  - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

### **2.1.3 Tata Laksana**

#### **a. Sistem**

Sistem yang diberlakukan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Majene dalam menjalankan Tupoksinya yaitu tetap terstruktur sesuai dengan Struktur Organisasi SKPD.

#### **b. Prosedur**

Prosedur yang diterapkan pada Dishubkominfo Kab. Mejene yaitu surat yang masuk diterima Kepala Dinas kemudian disposisi pada Sekretaris, selanjutnya di distribusikan pada Bidang dan atau Seksi / Sub Bagian sesuai isi surat.

Untuk surat yang keluar tetap harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas, apabila Kepala Dinas tidak ada di tempat dan atau halangan untuk menandatangani surat, maka Kepala Dinas tetap mendapatkan laporannya.

#### **c. Mekanisme**

Mekanisme sesuai prosedur pada Dishubkominfo Kab. Majene yaitu surat yang masuk pada dinas diagendakan, Kepala Dinas disposisi ke Sekretaris atau bisa langsung ke Kepala Bidang apabila surat tersebut dianggap segera dan urgent, dan dari Kepala Bidang surat turun ke Kasie, proses pekerjaan yang telah selesai ditandatangani Kepala Dinas dengan terlebih dulu mendapat persetujuan

dari Kepala Bidang atau atasan langsungnya, penandatanganan bisa dilakukan Sekretaris atau Kepala Bidang dengan melihat kepentingan surat tersebut.

Pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keluar / koordinasi Kepala Dinas dapat mewakilkan Pejabat dibawahnya, dan mendapatkan laporan dari kegiatan tersebut.

#### **d. Pelaksanaan Fungsi**

Dalam pelaksanaannya Kepala Dinas dalam memimpin Dishubkominfo Kab. Majene dibantu Sekretaris dalam proses pekerjaan administrasi, pekerjaan tersebut di luar pekerjaan teknis, untuk pekerjaan yang bersifat teknis Kepala Dinas memerintahkan pada Kepala Bidang.

Pada proses pekerjaan kesekretariatan, Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bagian ini menjalankan fungsinya sesuai dengan tupoksinya, sedangkan Kepala Bidang dalam proses menjalankan Tupoksinya dibantu oleh Kepala Seksi, Kepala Seksi ini yang menjalankan Tupoksinya pada level bawah untuk struktural, dengan melalui pertimbangan dan arahan dari Kepala Bidang maupun Kepala Dinas. Kepala Seksi ini bisa dibantu tugasnya oleh staf yang berada langsung dibawahnya, dengan tetap memberikan arahan, pembinaan dan pengawasan.

## **2.2 SUMBER DAYA SKPD**

### **2.2.1 Kepegawaian**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kab. Majene sebagai dinas penyelenggara teknis dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya belum sepenuhnya didukung oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya tingkat penyerapan Diklat teknis khusus bidang urusan Perhubungan. Lalu pada bidang urusan Komunikasi dan Informatika, belum pernah tercatat adanya personil PNS yang mengikuti Diklat Teknis Khusus. Jadi, dapat dianalisa bahwa, tercatat hanya 4 orang yang pernah mengikuti Diklat Teknis Khusus Perhubungan atau sekitar 8% dari jumlah 52 orang PNS. Lalu ditambah kondisi 2 orang dari 4 orang tersebut tercatat dalam daftar mutasi/pindah tugas, hingga tenaga teknis khusus yang tersisa tinggal 2 orang. Sementara pada tingkat pendidikan formal, Dishubkominfo didominasi oleh 44% lulusan Strata Satu

(S1) atau 23 orang dari 52 PNS dan hanya 2% dari lulusan Pasca Sarjana atau 1 orang.

Kondisi personil kepegawaian pada Dishubkominfo yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Honorer dan Sukarela, secara keseluruhan didominasi oleh tenaga sukarela yang berjumlah 195 orang atau sekitar 77% dari 253 personil. Hal ini terjadi karena secara umum petugas lapangan yang bekerja siang dan malam, demi mengejar target PAD umumnya didominasi oleh tenaga sukarela. Namun dengan melihat jumlah tenaga sukarela perempuan yang cenderung berjumlah besar yakni sebesar 30% atau 59 orang dari 195 personil tenaga sukarela. Hal ini dinilai mengarah kepada status kelebihan jumlah personil tenaga sukarela perempuan yang cenderung lebih memilih kerja administrasi yang umumnya telah dikerjakan oleh personil PNS.

Secara umum, jabatan struktural yang kosong telah terisi seluruhnya. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa fungsi manajerial sudah seharusnya menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pejabat struktural, karena untuk menempati posisi eselon tidak serta merta didapatkan tanpa melalui proses penjurangan karir dan pertimbangan jabatan. Oleh sebab itu, berdasarkan bagan struktur organisasi Dishubkominfo, menggambarkan bahwa sistem organisasi yang tersusun secara sistematis tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang didukung oleh garis komando dan koordinasi yang kuat, sehingga cerminan keberhasilan dapat dengan mudah tergambar di depan mata. Hanya saja masih perlu pendidikan dan pelatihan ke arah yang sifatnya lebih teknis, karena urusan perhubungan serta urusan komunikasi dan informatika membutuhkan tenaga dan pemikiran yang secara keseluruhan terintegrasi kepada Visi Misi Kepala Daerah, Visi Misi SKPD Provinsi serta Visi Misi Kementerian Perhubungan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Rincian kondisi Kepegawaian Dishubkominfo Kab. Majene adalah sebagai berikut :

Tabel  
Daftar Persentase Pegawai Negeri Sipil & Pegawai Tidak Tetap  
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah	%	Ket.
		L	P			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pejabat Struktural	14	7	21	100	
	- Eselon II.b	1	0	1	5	Kadis
	- Eselon III.a	1	0	1	5	Sekretaris
	- Eselon III.b	2	2	4	19	Kabid
	- Eselon IV.a	10	5	15	71	Kasie / Kasubag
2.	Pangkat / Golongan	39	13	52	100	
	- Golongan IV	3	1	4	8	
	- Golongan III	19	7	26	50	
	- Golongan II	15	4	19	37	
	- Golongan I	2	1	3	6	
3.	Pendidikan Terakhir	39	13	52	100	
	- Pasca Sarjana (S2)	1	0	1	2	
	- Strata satu (S1)	18	5	23	44	
	- Diploma III	4	3	7	13	
	- SLTA	13	4	17	33	
	- SLTP	2	1	3	6	
	- SD	1	0	1	2	
4.	Diklat Teknis	4	0	4	100	
	- Penyidik Perhubungan Darat	2	0	2	50	1 org mutasi
	- Penguji Kendaraan Bermotor	2	0	2	50	1 org mutasi
5.	Personil	181	72	253	100	
	- Pegawai Negeri Sipil	39	13	52	21	
	- Honorer	6	0	6	2	SK Bupati
	- Sukarela	136	59	195	77	SK Bupati

## 2.2.2 Sarana Prasarana

Tabel  
Kondisi Sarana dan Prasarana  
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Gedung:					
	- Kantor	-	-	-	-	Tidak ada Kantor tetap
	- Balai PKB	1	-	-	1	
	- Terminal Angkutan Darat Tipe-B	-	1	-	1	Dalam Tahap Penyempurnaan Pembangunan
	- Terminal Pembantu	1	-	-	1	
2.	Kendaraan:					
	- Roda 4	1	-	-	1	Khusus Kadis
	- Roda 2	9	-	1	10	
	- Roda 4 Patroli	-	-	-	-	Belum Ada
	- Roda 2 Patroli	-	1	1	2	
3.	Meubelair:					
	- Kursi Manager	9	-	-	9	
	- Kursi Tamu	1	-	-	1	
	- Kursi Panjang	9	-	-	9	
	- Kursi Putar	2	-	-	2	
	- Kursi Rapat	49	-	-	49	
	- Meja Kerja	7	-	-	7	
	- Meja Staf	18	-	-	18	
	- Lemari Arsip	7	-	-	7	
4.	Komunikasi dan Informasi:					
	- Televisi	1	1	-	2	
	- In Fokus	-	-	1	1	
	- Handycam	-	-	1	1	
	- Digital Camera	-	-	1	1	
	- Komputer PC	4	-	-	4	
	- Laptop	3	1	-	4	
	- Printer	4	-	-	4	
	- Mesin Tik	-	1	-	1	
	- Handy Talky (HT)	3	2	-	5	
	- Power Amplifier	1	-	-	1	
	- Amplifier	2	-	-	2	
	- Mixer	1	-	-	1	

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah	Ket.
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
1	2	3	4	5	6	7
	- Loudspeaker	12	-	-	12	
	- Mic Wireless	2	-	-	2	
	- Mic Kabel	2	-	-	2	
	- Tiang Mic	3	-	-	3	
5.	Perlengkapan Lainnya:					
	- AC Split	4	-	-	4	
	- Mesin Ptg. Rumput	-	1	-	1	
	- Dispenser	2	-	-	2	

### 2.3 KINERJA PELAYANAN SKPD

Pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan di Kabupaten Majene dalam era Otonomi Daerah telah mendorong pesatnya laju pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang sosial ekonomi dan pendidikan, seperti berkembangnya lahan pemukiman, lahan perkantoran pemerintah, lahan perdagangan dan jasa, serta lahan untuk sekolah atau perguruan tinggi. Kondisi geografis yang relatif berbukit-bukit dan cenderung tidak serupa pada beberapa wilayah lainnya di Kabupaten Majene, juga merupakan daerah rawan bencana karena umumnya tanah perbukitannya cenderung mengandung zat kapur dan juga wilayah pemukiman umumnya berada pada wilayah pesisir barat pulau Sulawesi. Hal tersebut berpengaruh pada tingkat aksesibilitas masyarakat mengenai jarak, waktu dan biaya yang tentunya akan berbanding lurus dengan pergerakan masyarakat justeru menjadi tidak efektif dan efisien.

Kabupaten Majene yang telah diplot menjadi Ibukota Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan komitmen pembentukan Provinsi termuda di pulau Sulawesi, tentu kedepannya akan menjadi lumbung sumber daya manusia berkualitas yang akan mengisi formasi-formasi di dunia pemerintahan maupun di dunia usaha. Tidak hanya proses transformasi keilmuan yang dijadikan fokus pendidikan, pembenahan sisi moralitas dan keagamaan peserta didik juga menjadi hal yang sangat krusial. Tepatnya, diperlukan suatu sistem yang mampu mendukung profesionalisme, pembentukan moral dan agama manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa dan berteknologi.

Asumsi bahwa semakin berkembangnya tingkat kesibukan masyarakat akan berimbas kepada bertambahnya volume kepadatan kendaraan transportasi baik darat, laut maupun udara dan juga informasi-informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal tersebut tentu berimplikasi pada perubahan sistem transportasi, komunikasi dan informatika, yang merupakan urat nadi bagi kehidupan manusia dengan fungsinya sebagai penggerak, pendorong dan pembangunan di wilayah Kabupaten Majene.

Perkembangan Teknologi informasi dan komunikasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia modern saat ini. Diseminasi informasi yang dikomunikasikan lembaga pemerintah maupun lembaga swasta lewat berbagai media cenderung membuat segalanya menjadi mudah. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari peran serta masyarakat dalam menerima dan menyaring setiap informasi yang masuk dan berkembang di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai simpul jaringan transportasi, komunikasi dan informatika di Kabupaten Majene selanjutnya yang dapat ditingkatkan fungsi dan peranannya adalah Terminal Angkutan Darat, Pelabuhan Laut serta Pelabuhan penyeberangannya, Sistem Informasi Transportasi Umum, Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Masyarakat yang tentunya berasumsi dari pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika hingga berimplikasi pada berkembangnya tingkat pelayanan kepada masyarakat.

Pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika yang diinginkan ke depan untuk tahun 2012-2016 tergambar pada rencana program dan kegiatan indikator Renstra ini.

### **2.3.1 Pengelolaan PAD di Sektor Perhubungan.**

Pengelolaan PAD di sektor perhubungan pada 1 (satu) tahun terakhir mencapai sebesar Rp. 257.733.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau sebesar 78.19%. Dan dengan berdasarkan target yang telah diproyeksikan dalam rapat antara Lembaga Legislatif Daerah (DPRD) dengan Lembaga Eksekutif Daerah (Pemerintah Daerah) untuk 5 (lima) tahun kedepan sebesar Rp. 402.063.480 (Empat Ratus Dua Juta Enam Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau mengalami kenaikan sebesar 56% sesuai jenis tarif penerimaan dengan asumsi bahwa usaha jasa di bidang urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika akan mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya volume kendaraan pada setiap tahunnya.



Adanya pembaharuan Peraturan Daerah mengenai retribusi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Majene yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, maka diadakan pembaharuan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan di Majene pada Tanggal 30 Desember 2011, sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Parkir.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 18 Tahun 2011, tentang Retribusi Terminal.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 19 Tahun 2011, tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 14 Tahun 2011, tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 23 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin Trayek.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 16 Tahun 2011, tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene, Nomor 20 Tahun 2011, tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Kenaikan yang sangat signifikan tersebut disebabkan karena 90% dari tarif retribusi di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Majene mengalami kenaikan sebesar 50-100%.

### **2.3.2 Perkembangan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika di Kabupaten Majene.**

Pada dasarnya pencitraan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika di Kabupaten Majene yang bertujuan untuk melayani masyarakat umumnya didominasi oleh investor dari BUMN dan perusahaan swasta (lokal maupun asing). Secara umum, sistem jaringan Telekomunikasi dan Informatika yang dibangun secara berkala pada seluruh wilayah Indonesia oleh beberapa perusahaan telekomunikasi (perusahaan lokal maupun asing) didasarkan atas regulasi pemerintah pusat. Dukungan pemerintah Republik Indonesia atas pengembangan Teknologi Telekomunikasi dan Informatika secara elektronik melalui Kementrian Komunikasi dan Informasi, tentunya merupakan sebuah terobosan besar yang mesti direspon dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakatnya.

Meningkatnya persebaran Menara Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Signal) di Kabupaten Majene semakin menambah kuantitas akses jaringan telekomunikasi yang berintegrasi langsung kepada level pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai efek dari kemudahan informasi yang difasilitasi oleh pemerintah pusat dan daerah. Efek dari dukungan kemudahan informasi tersebut belum didukung secara penuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Majene dari sisi Regulasi, karena diperlukan sebuah aturan atas dasar kearifan lokal demi eksistensi stabilitas lingkungan hidup yang perlu terus dijaga. Belum disahkannya Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan belum adanya petunjuk yang mengatur tentang keberadaan Menara Telekomunikasi (BTS), pengendalian dan pengawasannya di Kabupaten Majene tentu berimbas kepada tidak adanya kontribusi atas penggunaan dan pemanfaatan Menara Telekomunikasi (BTS) untuk pengembangan daerah.

Penyedia Menara BTS bersama maupun penyedia layanan Telekomunikasi (Provider) yang beroperasi di Kabupaten Majene berdasarkan data sementara dalam tabel yang terhimpun di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Bidang Peremberdayaan Media dan Telekomunikasi berdasarkan permohonan surat Rekomendasi yang masuk dan informasi dari kelurahan serta desa, adapun Menara yang dibangun tanpa bukti surat Rekomendasi disebabkan karena seringnya berpindah-pindah kantor hingga arsip mengenai hal tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Terhitung sejak tahun 2010 diketahui bahwa terdapat sejumlah 22 Menara BTS yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pamboang dengan variasi ketinggian antara 30 M hingga 80 M.

Dukungan Pemerintah Daerah untuk pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informatika terfokus kepada Pelayanan Pendidikan dengan Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) dan Keuangan dengan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah). Setelah ada kebijakan pemerintahan mengenai E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang proses pelaksanaannya hingga akhir tahun 2012, maka pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene mulai merambah kepada pelayanan masyarakat mengenai kependudukan. Sinkronisasi pemanfaatan dan pendayagunaan struktur kelembagaan di Majene berindikasi pada kektidakjelasan wewenang SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam hal pengembangan jaringan Telekomunikasi dan Informatika. Hal tersebut disebabkan oleh karena tumpang tindihnya kewenangan antara Bagian Humas Sekretariat Daerah dan SKPD Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika serta tidak adanya master plan pengembangan jaringan Telekomunikasi dan Informatika.

Pengembangan Jaringan diluar Jardiknas dan SIPKD akan dimulai melalui perencanaan konsep kerjasama antara PT. Telkom dan Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan asumsi agar perkembangan Teknologi Telekomunikasi dengan sistem jaringan kabel bisa dapat diketahui sebagai bahan referensi.

Minimnya digelar Rapat Koordinasi antara SKPD Daerah, Provinsi dan Kementrian hingga berimplikasi kepada kurangnya sinergitas program kegiatan yang berkelanjutan dari pusat hingga ke daerah. Hal tersebut terwujud dari Program PLIK (Pusat Layanan Internet Kecamatan) yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo yang awal pembangunan, pengelolaan dan pengawasannya tidak diketahui oleh SKPD Daerah. Secara otomatis tingkat perkembangan Program PLIK ini tidak diketahui oleh Pemerintah Daerah.

Pada sisi pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat diindikasikan mengalami peningkatan dari seringnya diadakan pertemuan, pelatihan, dan pengembangan KIM di Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pamboang. Diseminasi informasi melalui Forum Kelompok Media Tradisioal (FK-Metra) yang belum lama ini diresmikan turut memberikan sumbangsih buat perkembangan Kesenian Daerah setelah dinobatkan sebagai pemenang pada perlombaan seni drama pada tingkat Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel  
Data Menara Telekomunikasi  
Kab. Majene Tahun 2012

NO.	NAMA OPERATOR	ALAMAT OPERATOR	DUSUN	LINGKUNGAN	DESA	KELURAHAN	KECAMATAN	TINGGI TOWER (M)	LUAS BANGUNAN (M <sup>2</sup> )	TERBIT REKOMENDASI	TAHUN DIBANGUN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	PT. TELKOMSEL	SOMBA UTARA	-	SOMBA UTARA	-	MOSSO	SENDANA	72	24	-	2004	
2.	PT. EXCELCOMINDO	SOMBA SELATAN	-	SOMBA SELATAN	-	MOSSO	SENDANA	55	64	-	2004	
3.	PT. TELKOMSEL	DUSUN RAWA-RAWANG	-	SOMBA SELATAN	BONDE-BONDE	-	TUBO SENDANA	75	100	-	2005	
4.	PT. INDOSAT	SOMBA SELATAN	-	SOMBA SELATAN	-	MOSSO	SENDANA	72	64	-	2007	
5.	PT. INDOSAT	DESA BUTTU PAMBOANG	PUARE	-	BUTTU PAMBOANG	-	PAMBOANG	80	300	-	2008	
6.	-	-	-	UDZUNG	-	SIRINDU	PAMBOANG	60	300	-	2009	MENARA TRI, 44.1.2012
7.	-	-	-	-	-	SIRINDU	PAMBOANG	60	300	-	2009	MENARA TRI, 44.1.2012
8.	PT. PROTELINDO (a.n. Syarifuddin)	Kompleks Jipang Permai DP. 6 No. 8 Makassar	-	LEMBANG DHUA	-	BAURUNG	BANGGAE TIMUR	62	320	2/9/2009	2009	
9.	PT. HCPT (HUTCHISON CP TELKOM INDONESIA)	MENARA MULIA / 10 F JL. GATOT SUBROTO KAV. 9-11, JAKSEL, 12930	LUAOR	-	BONDE	-	PAMBOANG	60	1800	-	2009	
10.	PT. HCPT (HUTCHISON CP TELKOM INDONESIA)	MENARA MULIA / 10 F JL. GATOT SUBROTO KAV. 9-11, JAKSEL, 12930	RAWANG	-	BABABULO	-	PAMBOANG	60	582	-	2009	
11.	PT. HCPT (HUTCHISON CP TELKOM INDONESIA)	MENARA MULIA / 10 F JL. GATOT SUBROTO KAV. 9-11, JAKSEL, 12930	PESULOANG	-	-	SIRINDU	PAMBOANG	65	8200	-	2009	
12.	PT. HCPT (HUTCHISON CP TELKOM INDONESIA)	MENARA MULIA / 10 F JL. GATOT SUBROTO KAV. 9-11, JAKSEL, 12930	-	SIRINDU	-	SIRINDU	PAMBOANG	55	14000	-	2009	
13.	PT. HCPT	MENARA MULIA /	PASSAU	-	-	MOSSO DHUA	SENDANA	50	2400	-	2009	

	(HUTCHISON CP TELKOM INDONESIA)	10 F JL. GATOT SUBROTO KAV. 9- 11, JAKSEL, 12930										
14.	PT. TRIAKA BERSAMA	WOSINA BCA 1 LT. 6 Jln. Jend. Sudirman KAV. 22 - 23 karet setiabudi, Jaksel. 12920	PASSAU	LIPU	-	LABUANG	BANGGAE TIMUR	42	-	9.11.2011	-	
15.	DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI	BUKIT BOGOR RAYA BGK I 18/21 KEL CIMAHPUR KEC. BOGOR UTARA	-	-	-	MOSSO DHUA	SENDANA	50	-	14.7.2011	-	
16.	PT. PROTELINDO (a.n. Aswan)	JL. DAENG TATA LAMA NO. 40 MAKASSAR.	-	PURRAU	-	TANDE	BANGGAE TIMUR	50	-	15.4.2011	-	
17.	PT. PROTELINDO (a.n. Aswan)	JL. DAENG TATA LAMA NO. 40 MAKASSAR.	-	-	-	BAURUNG	BANGGAE TIMUR	30	-	15.4.2011	-	
18.	PT. TELKOMSEL	-	SULAI SELATAN	-	SULAI	-	ULUMANDA	72	400	-	2011	
19.	PT. TELKOMSEL	-	-	PURRAU	-	TANDE	BANGGAE TIMUR	72	400	-	2011	
20.	PT. EXCELCOMINDO	-	-	PURRAU	-	TANDE	BANGGAE TIMUR	53	100	-	2011	
21.	PT. TELKOMSEL	-	-	LUTANG	-	TANDE	BANGGAE TIMUR	52	360	-	2011	
22.	PT. TOWER BERSAMA	JL. P. BIDADARI I/33 KEMBANGAN JAKARTA UTARA	KONJA	-	PAMBOBORANG	BARU	BANGGAE	72	360	12.12.2012	-	

Tabel  
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD  
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>Optimalnya Pendapatan Asli Daerah</b>											<b>83,08 %</b>	<b>97,00 %</b>	<b>78,19 %</b>					
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum											100,00 %	107,15 %	90,19 %					
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor											80,00 %	100,44 %	102,50 %					
	- Retribusi Terminal											81,38 %	100,13 %	-					
	- Retribusi TRP 700											-	-	75,03 %					
	- Retribusi TRP 1000											-	-	78,08 %					
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir											108,28 %	100,53 %	81,91 %					
	- Retribusi Ijin Trayek											70,91 %	101,09 %	101,33 %					
	- Retribusi Sewa Loket											-	-	87,17 %					
	- Retribusi Usaha Lain-lain											-	-	92,10 %					
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan											95,60 %	61,25 %	-					
	- Retribusi Sertifikat Kapal											-	-	60,64 %					
	- Retribusi Pas-Kecil Kapal											-	-	63,76 %					

Tabel  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD  
 Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
 Kab. Majene Tahun 2012-2016

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>							<b>226.165.700</b>	<b>272.514.600</b>	<b>290.507.700</b>	<b>257.733.000</b>							
- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum							13.200.500	22.824.000	32.145.000	28.770.000							
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor							14.757.000	15.727.000	17.074.000	18.553.000							
- Retribusi Terminal							-	185.142.100	200.263.700	-							
- Retribusi TRP 700							109.909.600	-	-	98.924.000							
- Retribusi TRP 1000							49.669.000	-	-	55.824.000							
- Retribusi Tempat Khusus Parkir							14.121.600	16.241.500	17.090.000	13.650.000							
- Retribusi Ijin Trayek							3.580.000	3.900.000	5.560.000	6.100.000							
- Retribusi Sewa Locket							2.958.000	-	-	10.068.000							
- Retribusi Usaha Lain-lain							2.565.000	-	-	5.319.000							
- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan							-	28.680.000	18.375.000	-							
- Retribusi Sertifikat Kapal							8.390.000	-	-	10.005.000							
- Retribusi Pas-Kecil Kapal							7.015.000	-	-	10.520.000							

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD**

### **2.4.1 Tantangan**

Adapun tantangan pada pengembangan pelayanan SKPD Dishubkominfo Kab. Majene :

- a. Belum adanya Kantor Dishubkominfo Kab Majene yang definitif.
- b. Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah.
- c. Tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas.
- d. Banyaknya kendaraan angkutan penumpang umum yang tidak mau masuk terminal dengan alasan tidak ada penumpang dan rusaknya jalan di dalam pelataran Terminal Induk Majene.
- e. Banyaknya kendaraan plat hitam yang dipergunakan untuk operasional sebagai angkutan penumpang umum dan angkutan barang.
- f. Belum adanya kesadaran para pemilik kapal / nelayan untuk segera memperbaharui kelengkapan surat-surat kapal mereka pada tepat waktu.
- g. Masih kurangnya jaringan telekomunikasi dan informatika di pedesaan.

### **2.4.2 Peluang**

Adapun peluang-peluang pada pengembangan pelayanan SKPD Dishubkominfo Kab. Majene :

- a. Adanya kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa terakomodir.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang perhubungan dan komunikasi informatika.
- c. Memanfaatkan lahan parkir.
- d. Meningkatkan pembangunan Terminal Induk Majene tipe B.
- e. Sosialisasi kendaraan yang berplat hitam untuk merubah ke plat kuning.
- f. Mengembangkan jaringan telekomunikasi dan informatika dari kota sampai ke desa.



## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI

#### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN SKPD

Tabel  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD  
Dinas Perhubungan Komunikasi & Infomatika  
Kab. Majene Tahun 2012-2016

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan SKPD	<b>Urusan Perhubungan</b>				
	1. Belum adanya gedung kantor permanen.	Adanya Gedung Kantor yang representatif	Merencanakan program Pembangunan Gedung Kantor yang representatif.	Harus melalui saran dan pertimbangan pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD.	Seringnya perpindahan kantor antar SKPD.
	2. Masih kurangnya kendaraan operasional dalam mengontrol kelancaran lalu lintas.	Adanya kendaraan representatif untuk mengontrol kelancaran lalu lintas	Merencanakan program pengadaan kendaraan Patroli Pengawasan yang representatif .	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Tidak adanya kendaraan Patroli pengawasan.
	3. Tingginya tingkat kecelakaan pada ruang jalan provinsi.	Adanya alat pemberi isyarat lalu lintas dan pengendali pengaman lalu lintas	merencanakan program pengadaan alat pemberi isyarat lalu lintas dan pengendali pengaman lalu lintas.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan DPRD.	Tidak adanya alat pemberi isyarat lalu lintas dan pengendali pengaman lalu lintas.
	4. Kesemrawutan lalu lintas pada kawasan pasar sentral dan pasar tradisional.	Adanya patroli pengawasan lalu lintas.	Mengadakan program pengawasan lalu lintas.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan DPRD.	Kurangnya personil pengawasan lalu lintas.
5. Belum efektifnya penggunaan terminal sebagai pusat kegiatan naik turun penumpang angkutan umum.	Sempurnanya pembangunan peningkatan Terminal Induk Majene.	Mengadakan program pembangunan peningkatan Terminal Induk Majene.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan DPRD.	Belum sempurnya pembangunan peningkatan Terminal Induk Majene.	

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6. Masih minimnya sarana prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bidang perhubungan.	Adanya sarana dan prasarana perhubungan yang representatif.	Mengadakan program pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana perhubungan.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan DPRD.	Belum adanya sarana dan prasarana perhubungan yang representatif.
	7. Belum optimalnya pengelolaan parkir daerah.	Adanya sarana dan prasarana perparkiran.	Mengadakan program pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana perparkiran.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan DPRD.	Masih minimnya sarana dan prasarana perparkiran.
	8. Belum optimalnya penarikan retribusi dari sektor perhubungan dalam menunjang kontribusi terhadap PDRB.	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi di bidang perhubungan.	Mengadakan program peningkatan sarana dan prasarana transportasi di bidang perhubungan.	Harus melalui saran pertimbangan Pemda dan DPRD.	Masih minimnya sarana dan prasarana transportasi di bidang perhubungan.
	<b>Urusan Komunikasi &amp; Informatika</b>				
	1. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi dalam masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Informatika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan program memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Informatika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan Pertimbangan DPRD</li> <li>- Mengacu pada Rancangan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten.</li> <li>- Mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten.</li> </ul>	Masih minimnya sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Informatika.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meratanya program PLIK (Pusat Layanan Informasi pada semua kecamatan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengadakan program memfasilitasi program pengadaan PLIK Kementerian Kominfo pada semua kecamatan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, DPRD, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).</li> </ul>	Belum meratanya program pengadaan PLIK pada semua kecamatan.

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Adanya WIM (Warung Informasi Masyarakat) pada semua kecamatan, kelurahan dan desa.	- Mengadakan program memfasilitasi pembangunan dan pengadaan WIM pada semua kecamatan, kelurahan dan desa.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, DPRD, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) serta Kementerian Pembangunan Infrastruktur Daerah Tertinggal (KPIDT)	Belum meratanya WIM pada semua kecamatan kelurahan dan desa.
		- Adanya Media Center pada Ibukota Kabupaten.	- Mengadakan Program memfasilitasi pembangunan dan Pengadaan Media center pada Ibukota Kabupaten.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, DPRD, Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO).	Belum adanya Media Center di Ibukota Kabupaten.
	2. Belum optimalnya infrastruktur akses teknologi informasi dan telekomunikasi dari kota sampai ke desa.	- Adanya Regulasi tentang pengendalian dan pengawasan pengawasan Infrastruktur / Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Instalasi Kabel Telkom, Menara BTS, Via Satelit (V-Sat), Lintas Arta, dan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi lainnya), dari kota sampai ke desa.	- Mengadakan program pendataan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi dan Informatika.	- Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, DPRD dan Perusahaan Penyedia Layanan Telekomunikasi.	Belum adanya Regulasi tentang Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur / Jaringan Telekomunikasi dan Informatika.

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		- Adanya pengendalian dan pengawasan Infrastruktur / Jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Instalasi Kabel Telkom, Menara BTS, Via Satelit (V-Sat), Lintas Arta, dll), dari kota sampai ke desa.	- Mengadakan program pengendalian dan pengawasan infrastruktur / jaringan Telekomunikasi dan Informatika (Instalasi Kabel Telkom, Menara BTS, V-Sat, Lintas Arta	- Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, DPRD dan Perusahaan Penyedia Layanan Telekomunikasi.	Belum adanya pengendalian dan pengawasan Infrastruktur / Jaringan Telekomunikasi dan Informatika dari kota sampai ke desa.
		- Adanya Dokumen Master Plan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Majene.	- Mengadakan program pendataan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika.	- Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda, DPRD dan Perusahaan Penyedia Layanan Telekomunikasi.	Belum adanya Dokumen Master Plan pembangunan jaringan Telekomunikasi dan Informatika.
	3. Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan sistem teknologi informasi.	Adanya SDM (Sumber Daya Manusia) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi	Mengadakan program mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan DPRD.	Masih kurangnya SDM mengenai pengelolaan dan pengembangan sistem teknologi informasi.
	4. Minimnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten lain.	Adanya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten lain.	Mengadakan program koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten lain.	Harus melalui saran dan pertimbangan Pemda dan DPRD.	Tidak jelasnya sistem koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten lain.
Renstra SKPD Provinsi	<b>Transportasi Darat</b>				
	Panjang Jalan Nasional di Provinsi Sulawesi Barat sepanjang 662,96 Km. Dan yang baik 525 Km. Jalan Provinsi	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas jalan yang telah ada sesuai dengan kemampuan daya dukung jalan.	Pendayagunaan fasilitas jembatan timbang sebagai sarana pengawasan dan penegakan hukum, penyediaan	Perbaikan jalan nasional yang rusak sepanjang 137,96 Km., dan Jalan Provinsi yang rusak sepanjang 449 Km.	Tingkat kejenuhan yang berakibat memburuknya pelayanan jalan.

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	sepanjang 653.50 Km. Dalam keadaan baik sepanjang 204,5 Km.		fasilitas keselamatan jalan serta penyediaan subsidi keperintisan dan sarana keperintisan.		
	Jembatan Timbang belum beroperasi secara maksimal	Adanya jembatan timbang baru	Adanya program pemeliharaan fasilitas jembatan timbang.	Pemerintah pusat telah mengucurkan dana sebesar Rp. 6,5 Milyar untuk pembangunan Jembatan Timbang Baru di Kab. Mamuju.	Jembatan timbang sering mengalami kerusakan.
	Meningkatnya kelas Terminal Simbuang Mamuju menjadi Terminal Angkutan Penumpang Type A	Tertatanya fasilitas di lingkungan Terminal.	Penataan fasilitas di lingkungan Terminal.	Perkembangan jumlah kendaraan (bus, truk dan mobil penumpang) setiap tahunnya mengalami peningkatan.	Masih kurangnya penataan fasilitas di lingkungan terminal.
	Rambu penunjuk lalu lintas di Provinsi Sulawesi Barat telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat.	Adanya rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan jalan Nasional.	Adanya program pemasangan rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan jalan Nasional.	Pemerintah Pusat telah memberikan bantuan dana setiap tahun untuk pemasangan Rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan jalan Nasional.	Masih minimnya rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan jalan Nasional.
	<b>Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan</b>				
	Provinsi Sulawesi Barat telah mendapatkan bantuan oleh pemerintah pusat berupa pembangunan jalur-jalur penyeberangan sungai yang dilaksanakan oleh ASDP.	Adanya jalur-jalu penyeberangan sungai.	Adanya program Pembangunan Akses penyeberangan sungai (tersebar)	Pemerintah pusat telah memberikan bantuan berupa jalur-jalu penyeberangan sungai yang dilaksanakan oleh Perusahaan ASDP (Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)	

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>Transportasi Kota.</b>				
	pembangunan Jaringan jalan perkotaan masih sangat terbatas dan belum tertata baik.				
	<b>Keselamatan</b>				
	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan				
	<b>Transportasi Laut</b>				
	kondisi permintaan jasa pelayanan transportasi laut belum maksimal.				
	<b>Transportasi Udara</b>				
	Bandar Udara Perintis Tampa Padang ditingkatkan panjang landasarnya dari 500 M menjadi 2.250 M. Sudah dipergunakan oleh Pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 737-200 yang berkapasitas 120 penumpang.				
	<b>Kondisi Komunikasi dan Informatika</b>				
	Layanan Internet ke masyarakat masih sangat terbatas.				
	Instalasi jaringan Internet antar SKPD				
	<b>Sumber Daya Manusia</b>				
	Jumlah PNS DISHUBKOMIN FO sebanyak 59 orang. S2=7 orang, S1=34, D3=3 orang, SLTA=15 orang.				

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Renstra Kementerian Perhubungan					
Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika	<b>Pengembangan Infrastruktur</b>				
	Penetapan UU No.38/2009 ttg. Pos, sbg. Pengganti UU No.6/1984 dan RUU di era Konvergensi sebagai pengganti UU No. 36/1999 ke depan.				
	Pengakhiran bentuk duopoli pada penyelenggara n telekomunikasi SLI dan SLJJ masing-masing pada Thn. 2007 dan 2008 serta diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PT. Telkom atas pengakhiran hak eksklusivitas pada penyelenggara n telekomunikasi lokal dan SLJJ.				
	Perkuatan badan regulasi telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai regulator di sektor telekomunikasi.				
	Implementasi interkoneksi berbasis biaya yang menghilangkan hambatan (barrier to entry) bagi penyelenggara baru dan mendorong terjadinya penurunan tarif.				
	Penataan ulang industri				

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	penyiaran melalui pengelompokan penyelenggara penyiaran menjadi Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan dan Lembaga Penyiaran Komunitas.				
	Penyediaan jasa pos di 2.341 kantor pos cabang luar kota melalui program Public Service Obligation (PSO) dan dimulainya penyediaan jasa telekomunikasi di 31.824 desa dan jasa akses internet di 4.217 kecamatan melalui program Universal Service Obligation (USO).				
	Pembukaan peluang usaha untuk penyelenggara n telekomunikasi sambungan bergerak generasi ketiga (3G), SLJJ, SLI dan akses nirkabel berpita lebar (broadband wireless access).				
	Fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (backbone) telekomunikasi nasional serat optic Palapa Ring.				



Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pembukaan kode akses SLJJ di balikpapan yang memungkinkan terjadinya customer sharing antar penyelenggara.				
	Penyelesaian proyek pengembangan infrastruktur penyiaran RRI di 138 Kabupaten/Kota blank spot yang tersebar di 28 Provinsi.				
	Dimulainya pembangunan pemancar TVRI di 25 Lokasi terpencil, perbatasan, dan blank spot melalui proyek improvement of TV Transmitting Stations Phase-I.				
	Dimulainya migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital melalui penetapan Digital Video Broadcasting (DVB) sebagai standar penyiaran TV Digital yang dilanjutkan dengan uji coba implementasi TV Digital secara simulcast (siaran bersama dengan siaran analog) .				
	Rehabilitasi fasilitas dan peningkatan jangkauan penyiaran televisi ke daerah blank spot melalui proyek PLHN : Improvement og				

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TV Transmitting Stations (ITTS) – Loan Spanyol.				
	Penguatan pemancar RRI Daerah.				
	Pengembangan sistem Manajemen Perizinan Bidang Penyiaran (SIMP).				
	Pertumbuhan Teledensitas fixed line (termasuk fixed wireless access) sebesar 156% yaitu dari 4,79% menjadi 11,49%, Pertumbuhan seluler sebesar 358% (14,02% menjadi 61,72%), Pertumbuhan pengguna Internet sebesar 101% (5,61% menjadi 11,3 %).				
	Jangkauan penyiaran RRI terhadap populasi mengalami peningkatan yaitu dari 66% menjadi 85%. Sedangkan Televisi publik (LPP TVRI) menurun tajam yaitu dari 81% menjadi 60%.				
	Tingkat kepemilikan komputer pada rumah tangga masih sangat rendah yaitu hanya 4,40% dengan distribusi sebagai berikut : Jawa : 5,30%, Sumatera :				

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2,90%, Sulawesi 2,70%, Maluku dan Papua sebesar 2,10%.				
	31 ribu lebih desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet, lebih dari 80% infrastruktur pos dan telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali dan Sumatera, serta distribusi Internet Service Provider (ISP) terkonsentrasi di Jawa (64% dari 306 ISP) dan 18% di Sumatera.				
	<b>Kerjasama Kelembagaan</b>				
	Kerjasama kelembagaan dengan KPI, Dewan Pers dan LKBN Antara.				
	Penyiapan lembaga pengelola dan pelayan informasi publik di lingkungan instansi pemerintah atau organisasi publik.				
	Pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Daerah.				
	Peningkatan kapasitas SDM bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Penyiaran (media).				

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penguatan peran kelembagaan.				
	<b>Pemanfaatan dan Pengembangan TIK</b>				
	Penyediaan jasa akses internet di beberapa kecamatan diantaranya melalui Community Access Point (CAP), Mobile CAP (MCAP) dan Warung Informasi Masyarakat (WIM).				
	Pembentukan Indonesia security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) yang melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan internet Indonesia.				
	Pengesahan UU No. 22/2008, Ttg. Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan undang-undang pertama di bidang TIK.				
	Dimulainya penyusunan RUU Cyber Crime dan RUU Ratifikasi Convention on Cyber Crime.				
	Pembangunan model implementasi e-government dan pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem				

Aspek kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (kewenangan SKPD)	Eksternal (diluar kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (e-government).				
	Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan e-literasi aparatur pemerintah, pekerja, dan masyarakat melalui proyek National ICT Human Resource Development dan Establishment of Vocational Training Center in the Field of ICT.				
	MoU oleh 18 kepala Kementrian sebagai bentuk memajukan pengembangan open source software (OSS) nasional.				
RTRW					
KLHS					

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI dan PROGRAM KEPALA DAERAH TERPILIH

Tabel  
 Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD  
 Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
 Kab. Majene Tahun 2012-2016

<b>VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA.</b>				
No.	Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan.	- Kurangnya SDM bidang Telekomunikasi dan Informatika.	- Terbatasnya anggaran	- Minat masyarakat dan aparatur pemerintah yang cukup tinggi terhadap Teknologi Informati dan Komunikasi.
2.	Peningkatan Akselerasi Pembangunan	- Minimnya produk hukum tentang pameran dan promosi yang mendukung iklim investasi.	- Proses regulasi yang relatif lama.	- Stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.
3.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta sarana-prasarana daerah.	- Belum optimalnya sarana dan prasarana perhubungan. - Terbatasnya sarana dan prasarana IT di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. - Tidak terjangkaunya jaringan IT di setiap kecamatan. - Belum adanya Master Plan atau Grand Design baik mengenai Sistem Transportasi Darat, Laut, Udara maupun Telekomunikasi dan Informatika.	- Belum efisiennya pemanfaatan infrastruktur dan sarana prasarana dasar daerah. - Tidak meratanya infrastruktur serta sarana dan prasarana di kota dan di desa. - Kurangnya tingkat pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana daerah. - Terbatasnya lahan untuk pelebaran jalan. - Belum terwujudnya pola dan struktur ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah. - Rendahnya aksesibilitas transportasi maupun Telekomunikasi dan Informasi terhadap daerah terpencil. - Belum adanya nota kesepahaman dalam era otonomi daerah antara Pemerintah Daerah dan BUMN (PT. Telkom) mengenai galian kabel optik .	- Besarnya proporsi anggaran untuk pengembangan infrastruktur daerah. - Tersedianya infrastruktur sarana dan prasarana daerah. - Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang representatif. - Ruas jalan untuk membuka daerah terisolasi merupakan jalan provinsi. - Perkembangan wilayah yang cukup pesat. - Tersedianya areal yang tidak produktif untuk pengembangan kawasan baru. - Menindaklanjuti Bantuan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi & Informatika, dan Kementerian Pembangunan daerah Tertinggal.

**VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA.**

No.	Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang aktifnya manuver-manuver promosi potensi daerah melalui potensi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika yang ada seperti diseminasi informasi kepada masyarakat.</li> <li>- Kurang memadainya perangkat IT dalam mendukung pelaksanaan promosi yang dapat mengundang investor masing masuk ke daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan anggaran yang memadai di bidang IT (Informasi dan Teknologi) terbatas pada bidang Keuangan (SIPKD) dan Pendidikan (JarDikNas).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi daerah yang relatif cukup dipoles dengan berbagai jenis promosi.</li> <li>- Penyelenggaraan kerjasama antara pengusaha asal Majene yang bermukim di luar Sulawesi Barat dengan pemerintah daerah.</li> </ul>
5.	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah aparatur yang belum memadai.</li> <li>- Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi.</li> <li>- Rendahnya kinerja aparatur pemerintah.</li> <li>- Belum terkelolanya dengan baik Website Kabupaten Majene.</li> <li>- Tidak jelasnya status Usaha Televisi Kabel Berlangganan sebagai penyelenggara jasa usaha swasta dalam peraturan daerah.</li> <li>- Menjamurnya usaha warnet yang tidak terkontrol akibat tidak adanya sistem pelaporan berkala dari pihak penyelenggara jaringan (PT.Telkom).</li> <li>- Tidak adanya sistem pelaporan secara berkala dari pemilik Menara BTS ( Base Transceiver Signal) yang beroperasi di Wilayah Kabupaten Majene.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum jelasnya pembagian kewenangan DISHUBKOMINFO DAN Sekretariat Daerah Bagian Humas dalam pelaksanaan pelayanan antar tingkatan pemerintahan.</li> <li>- Belum optimalnya implementasi hasil partisipasi masyarakat dalam pembangunan.</li> <li>- Ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.</li> <li>- Keengganan masyarakat dalam menuntut pelayanan prima dari pemerintah.</li> <li>- Belum adanya ketegasan tentang kewajiban penerapan SPM pada instansi pelayanan publik.</li> <li>- Belum optimalnya implementasi penegakan hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diplotnya kabupaten Majene menjadi Ibu Kota Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat.</li> <li>- Status kota Pendidikan memungkinkan adanya peningkatan minat masyarakat terhadap IT.</li> <li>- Iklim Politik dan keamanan yang kondusif.</li> <li>- Laju pertumbuhan penduduk yang datang dan bermukim di kota Majene.</li> </ul>
6.	Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak adanya sistem informasi yang tepat, efektif dan efisien yang bertujuan untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya Informasi dan Dokumen yang fokus kepada pemanfaatan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keseriusan dan kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi isu-isu</li> </ul>

**VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA.**

No.	Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian Sumber Daya Alam.	pengelolaan, dan pelestarian sumber daya alam.	bencana.
7.	Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem Kearsipan jangan hanya diterapkan di Kantor Perpustakaan &amp; Arsip daerah, atau sekretariat daerah saja, namun juga harus diterapkan pada setiap kantor yang menyelenggarakan kegiatan administrasi. Diperlukan tempat penyimpanan arsip yang representatif, agar dalam penyusunan dokumen perencanaan, tim penyusun tidak lagi menelusuri dalam waktu lama.</li> <li>- Tidak diterapkannya budaya dan sistem pelaporan di tingkat jabatan Kepala Seksi hingga ke tingkat jabatan kepala Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.</li> <li>- Belum diterapkannya secara menyeluruh Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menginstruksikan agar semua Badan Publik segera membentuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang dapat mendukung tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian untuk Pemerintah Daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya minat belajar di kalangan Pejabat eselon IV dan III yang menduduki posisi baru.</li> <li>- Minimnya staff yang bertugas membantu kepala seksi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.</li> <li>- Minimnya peralatan kantor yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</li> <li>- Ketidakmampuan aparatur pemerintahan yang menduduki posisi jabatan tertentu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemanfaatan aparatur pemerintahan yang berlebihan secara kuantitas pada beberapa Instansi Pemerintahan Daerah.</li> <li>- Penerapan pengawasan melekat kepada aparatur pemerintahan yang menduduki jabatan dengan cara pemberian penghargaan dan hukuman yang logis bagi yang berprestasi dan tidak berprestasi.</li> </ul>
8.	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya standar pelayanan minimal bagi aparatur pemerintahan yang diterapkan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak meratanya jumlah staf yang membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tiap kepala seksi dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya sanggar kegiatan seni budaya dengan nama AMPAT yang sering mengikuti event-event seni budaya pada tingkat provinsi dan</li> </ul>



**VISI : TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN YANG ADIL DAN MERATA DI KABUPATEN MAJENE DALAM TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, BERWIBAWA, DEMOKRATIS DALAM KEHIDUPAN AGAMIS DAN BERBUDAYA.**

No.	Misi Dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Informatika.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang diterapkan di Dinas, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.</li> <li>- Belum adanya program kegiatan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang disusun untuk mengetahui sejauh mana indeks kepuasan masyarakat yang dilayani oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.</li> <li>- Belum tersedianya jaringan IT di setiap kecamatan.</li> <li>- Tidak adanya koordinasi antara Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan &amp; Pariwisata dengan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam pengelolaan Diseminasi Informasi Pariwisata kepada masyarakat Indonesia dan Internasional.</li> </ul>	kepala bagian di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.	tingkat nasional yang di bina oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Bidang Pelayanan Media dan Informasi melalui FK-METRA (Forum Komunikasi Media Tradisional).
9.	Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan.			

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L Dan RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Tabel  
 Komparasi Capaian Sasaran Renstra SKPD Dishubkominfo Kab. Majene  
 Terhadap Sasaran Renstra SKPD Dishubkominfo Prov. Sulawesi Barat Dan  
 Renstra Kemen. Perhubungan dan Kemen. Komunikasi & Informatika  
 Tahun 2012-2016

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Perhubungan</b>			
1.	Terlaksananya koordinasi untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan.	Terwujudnya pemasangan Traffic Light dengan tenaga Matahari pada dua titik lokasi dalam kota Majene atas bantuan pemerintah Provinsi.	Pemasangan rambu lalu lintas di jalan Nasional dan jalan Provinsi.	Tersedianya prasarana dan sarana transportasi dengan kapasitas dan kualitas pelayanan memadai.
2	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan.		Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas.	Pembangunan fasilitas keselamatan LLAJ di wilayah perkotaan.
3	Terpeliharanya traffic light dan warning light.	Terwujudnya pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light pada tiga titik lokasi dalam kota Majene.	Pemeliharaan fasilitas keselamatan lalu lintas.	Penerapan APILL Tenaga Surya di wilayah perkotaan.
4	Tersedianya data perencanaan sarana dan fasilitas perhubungan.		-	Pengembangan sistem informasi fasilitas lalu lintas di wilayah perkotaan.
5	Adanya sebuah kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan.	Terwujudnya : 1. Perda Kab. Majene, No. 11 Tahun 2011, ttg Pajak Parkir. 2. Perda Kab. Majene, No. 18 Tahun 2011, ttg. Retribusi Terminal. 3. Perda Kab. Majene, No. 19 Tahun 2011, ttg. Retribusi Tempat Khusus Parkir. 4. Perda Kab. Majene, No. 14 Tahun 2011, ttg. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. 5. Perda Kab. Majene, No. 23 Tahun 2011, ttg. Retribusi Izin Trayek. 6. Perda Kab. Majene, No. 16 Tahun 2011, ttg. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 7. Perda Kab. Majene, No. 20 Tahun 2011, ttg. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.	-	
6	Tersosialisasinya kebijakan dan peraturan-peraturan		-	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	bidang perhubungan.			
7	Adanya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor yang representatif	Terwujudnya prasarana balai pengujian kendaraan bermotor.	-	
8	Terlaksananya uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.		Terwujudnya peningkatan kelaikan moda transportasi jalan; moda transportasi sungai. Danau dan penyeberangan.	
9	Terlaksananya pengawasan dan penertiban pengoperasian angkutan umum di jalan raya (Wasdal Lebaran dan Tahun Baru).	Terwujudnya ketertiban angkutan umum jelang lebaran dan tahun baru.	Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
10	Terlaksananya pengawasan peralatan keamanan darurat dan P3K pada angkutan umum.	Terwujudnya pengawasan dan pembinaan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.	Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
11	Adanya sarana transportasi yang representatif bagi masyarakat.	Terwujudnya sarana transportasi yang representatif bagi pelajar.	Pengadaan angkutan umum murah bagi masyarakat.	
12	Terlaksananya koordinasi untuk peningkatan pelayanan angkutan bagi masyarakat.	Terwujudnya Terminal Induk.	-	
13.	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.	Dokumen	-	
14.	Terlaksananya pengawasan dan pendataan kapal GT 7 ke bawah dalam wilayah Kab. Majene	Terwujudnya pengawasan dan pendataan kapal GT 7 ke bawah dalam wil. Kab. Majene.	-	
15.	Optimalnya penerimaan retribusi daerah (PAD) sektor perhubungan.	Terwujudnya optimalisasi penerimaan PAD sektor perhubungan.	-	
16.	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian.	Peningkatan PAD dari balai pengujian kendaraan bermotor.	Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	
17.	Adanya sumber daya dan sarana untuk penanggulangan bencana	Tersalurkannya kendaraan operasional berupa mobil pick up	-	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan bantuan SAR.	dan truck ke beberapa kecamatan.		
18.	Terlaksananya pengawasan peralatan keamanan, keselamatan dan P3K angkutan kapal.		Pengawasan dan Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.	Terjaminnya keselamatan dan keamanan dalam pelayanan jasa transportasi.
19.	Meningkatnya SDM aparatur bidang perhubungan.	1 Orang PNS Bidang Perhubungan Darat telah mengikuti pendidikan dan latihan Penyidik di Pusat Diklat Kementerian Perhubungan.	Pembinaan dan Pengembangan SDM Bidang Darat.	
20.	Terbangunnya pelataran dan prasarana pendukung terminal regional Majene.	Telah dilaksanakan proses uji coba kelaikan penggunaan pelataran dan prasarana pendukung terminal regional Majene.	Penataan fasilitas di lingkungan terminal.	
21.	Adanya Bus Sekolah bagi pelajar.	Telah difungsikannya Bus Sekolah yang beroperasi di beberapa kecamatan.	Pengadaan angkutan umum murah bagi masyarakat.	Pengadaan Bus Sekolah
22.	Adanya pagar pengaman jalan yang representatif.	-	Pembangunan pagar pengaman (Guard Rail).	
23.	Adanya warning light yang representatif.	-	-	
24.	Adanya rambu pendahulu petunjuk jurusan yang representatif.	-	Pemasangan rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan Jalan Nasional.	
25.	Adanya rambu lalu lintas dan papan nama yang representatif.	-	Pemasangan rambu lalu lintas di jalan Provinsi dan Jalan Nasional.	
26.	Adanya traffict light yang representatif.	Telah difungsikannya 2 buah traffict light dalam area kota Majene.	-	
27.	Terpeliharanya bangunan terminal.	Berfungsi gandanya bangunan terminal, selain sebagai terminal angkutan umum juga sebagai kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk sementara.	Penataan fasilitas di lingkungan Terminal.	
	<b>Komunikasi &amp; Informatika</b>			
28.	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan	-	Bintek dan Pelatihan Internet bagi	Layanan Administrasi dan dukungan teknis

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sumber daya komunikasi dan informasi.		Masyarakat.	lainnya.
29.	Adanya peralatan studio dan komunikasi yang memadai.	-	-	
30.	Adanya data rencana pengembangan dan kebijakan bidang komunikasi dan informasi.	Dokumen rancangan Peraturan Daerah ttg. Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi BTS.	Penelitian dan Pengembangan Sistem Informasi.	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi.
31.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi usaha-usaha TV Kabel dan Radio-radio dalam wilayah kabupaten Majene.	Adanya data rencana pengembangan dan kebijakan bagi usaha-usaha TV Kabel dan Radio-radio dalam wilayah Kab. Majene.	-	Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran.
32.	Terlaksananya koordinasi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat.	Terjalinnnya kerjasama penyesuaian data antara Dishubkominfo dan Perusahaan penyedia layanan Telekomunikasi.	Kerjasama Pembangunan Integrasi Sistem di 5 Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial.
33.	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat tingkat nasional.	Dimenangkannya perlombaan apresiasi pertunjukan rakyat pada tingkat provinsi di Mamuju.	Terselenggaranya perlombaan apresiasi pertunjukan rakyat tingkat provinsi.	Terselenggaranya pengembangan kebijakan komunikasi nasional Terlaksananya peningkatan peran media publik.
34.	Adanya pelatihan SDM bidang komunikasi dan informasi bagi aparat.	Keikut sertaan beberapa staf pada Diklat dasar pembuatan WEB di Kota Mamuju.	Diklat Dasar Managemen Teknologi dan Informasi.	Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan SDM Kominfo.
35.	Sampainya informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat.	Terlaksananya penyuluhan kepada Kelompok Informasi Masyarakat di beberapa desa.	Penyediaan layanan komunikasi dan informatika bagi media dan masyarakat.	Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik. Tersedianya pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
36.	Sampainya informasi untuk umum yang ditujukan kepada masyarakat.	Penggunaan peralatan sound sistem untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.	Penyediaan layanan komunikasi dan informatika bagi media dan masyarakat.	Meningkatnya penyebaran, pemerataan, dan pemanfaatan informasi publik.
37.	Terlaksananya pelayanan sound sistem bagi pemerintah dan masyarakat.	Penggunaan peralatan sound sistem untuk menyampaikan informasi kepada	-	

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Sasaran Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra SKPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		masyarakat sudah 72 kali.		
38.	Terlaksananya koordinasi untuk peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat.	Adanya dokumen untuk program peningkatan pelayanan informasi bagi masyarakat setelah pelaksanaan studi banding ke beberapa daerah lain. Diantaranya Parepare, Makassar, Palu dan Polewali Mandar.	Kerjasama Pembangunan Integrasi Sistem di 5 Kabupaten se-Sulawesi Barat.	Terlaksananya penyebaran / diseminasi informasi publik.

### 3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH dan KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dokumen RTRW dan KLHS sementara dalam tahap pembahasan.

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa datang. Isu Strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi / kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan / keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dapat dirumuskan Isu strategis dalam Renstra Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Periode 2012-2016 sebagai berikut :

#### **Urusan Perhubungan**

1. Belum adanya gedung kantor permanen
2. Masih kurangnya kendaraan operasional dalam mengontrol kelancaran lalu-lintas
3. Tingginya tingkat kecelakaan pada ruas jalan provinsi
4. Kesemrawutan lalu-lintas pada kawasan pasar sentral dan pasar tradisional
5. Belum efektifnya penggunaan terminal sebagai pusat kegiatan naik-turun penumpang angkutan umum
6. Masih minimnya sarana-prasarana perhubungan dalam menunjang pelayanan bidang perhubungan
7. Belum optimalnya pengelolaan parkir daerah
8. Belum optimalnya penarikan retribusi dari sektor perhubungan dalam menunjang kontribusi terhadap PDRB

#### **Urusan Komunikasi dan Informatika**

1. Masih rendahnya pemanfaatan informasi menyebabkan kesenjangan informasi dalam masyarakat
2. Belum optimalnya akses teknologi informasi dan komunikasi dari kota sampai ke desa
3. Masih kurangnya SDM dalam pengelolaan sistem teknologi informasi

## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1 VISI DAN MISI SKPD**

##### **4.1.1 Visi**

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene sebagai salah satu Dinas Daerah yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Majene, sudah barang tentu mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan visi daerah. Dalam rangka turut berperan serta mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Majene, maka telah ditetapkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene sebagai berikut :

**“TERPENUHINYA SISTEM DAN PELAYANAN TRANSPORTASI, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG BERKUALITAS DAN DINAMIS”**

##### **4.1.2 Misi**

Untuk mewujudkan Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majene sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene yaitu:

1. Meningkatkan infrastruktur fasilitas jalan dalam rangka meningkatnya keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana angkutan umum dan angkutan barang melalui peningkatan kualitas pelayanan terminal, pengujian kendaraan bermotor dan perizinan trayek yang baik;
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika dalam rangka peningkatan profesionalisme;
4. Meningkatkan daya jangkau telekomunikasi dan informatika guna memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap informasi.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPD**

##### **4.2.2 Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perhubungan darat / laut serta komunikasi dan informatika;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang perhubungan darat / laut serta komunikasi dan informatika;
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengutamakan keselamatan dan rasa aman dalam menggunakan jasa transportasi.
4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dalam rangka mengurangi kesenjangan informasi.
5. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah(PAD) dibidang perhubungan darat / laut serta komunikasi dan informatika;
6. Meningkatkan kualitas SDM dibidang perhubungan darat / laut serta komunikasi dan informatika;

#### **4.2.3 Sasaran**

Dengan adanya tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu memberikan pelayanan.
2. Kelancaran lalu-lintas angkutan umum, barang dan jasa.
3. Pelayanan uji laik jalan (kir) yang berkualitas.
4. Pelayanan perizinan yang profesional.
5. Kemudahan layanan telekomunikasi dan informatika bagi masyarakat.

### **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD**

#### **4.3.1 Strategi**

Maka oleh karena itu Strategi yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Memposisikan Kabupaten Majene sebagai daerah transit dengan terpenuhinya kebutuhan system transportasi yang memadai.
2. Meningkatkan Pembangunan Terminal Induk Majene dan mengoptimalkan fasilitas yang ada.
3. Melakukan persiapan pemeliharaan pengawasan dan pengamanan rambu-rambu lalu lintas.
4. Mengoptimalkan Lahan Perparkiran.
5. Pemenuhan rambu-rambu dan nama-nama jalan.

6. Penyediaan halte bus sekolah.
7. Memperluas jaringan dan jangkauan telekomunikasi dengan penggunaan teknologi maju sehingga makin tersebar dan menjangkau masyarakat umum.
8. Mengoptimalkan Warung Informasi Masyarakat.
9. Mempermudah pemberian perizinan dan pelayanan umum kepada masyarakat.
10. Penegakan supremasi hukum di sektor perhubungan.
11. Meningkatkan Pelaksanaan Operasi Teknis Laik Jalan dengan maksud memberi kesadaran kepada para pengusaha angkutan untuk melakukan Uji Berkala (Kir) Kendaraan dan dengan memperhatikan Izin Trayek.
12. Menciptakan koordinasi yang efektif dan efisien dengan pihak yang terkait.

#### **4.3.2 Kebijakan**

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
2. Membangun prasana dan fasilitas perhubungan.
3. Membangun dan mengembangkan terminal angkutan darat.
4. Membangun dan mengembangkan jaringan transportasi telekomunikasi dan informasi.
5. Membangun dan mengembangkan tambatan dermaga dan pelabuhan laut.
6. Meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.
7. Menyiapkan perangkat lunak di bidang perhubungan komunikasi dan informatika.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,  
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majene untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

**Perhubungan :**

**1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan**

- Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Rehabilitasi / pemeliharaan dan penggantian rambu dan papan nama jalan
- Rehabilitasi / pemeliharaan traffic light dan warning light
- Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
- Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang Perhubungan
- Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

**2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

- Rehabilitasi / pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan bermotor

**3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat dan Laut**

- Uji kelaikan sarana transportasi guna keselamatan penumpang (swiping)
- Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
- Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama
- Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan
- Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pengawasan dan pendataan kapal GT-7 ke bawah
- Optimalisasi penerimaan retribusi daerah
- Pengawasan dan pengendalian LLAJ
- Penanggulangan kecelakaan dan bantuan SAR
- Pengawasan peralatan keamanan dan keselamatan kapal
- Peningkatan SDM aparatur bidang Perhubungan

**4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan**

- Pembangunan pelataran terminal induk Majene
- Pengadaan bus sekolah

**5. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu-Lintas**

- Pengadaan pagar pengaman jalan
- Pengadaan dan pemasangan warning light
- Pengadaan dan pemasangan rambu pendahulu petunjuk jurusan

**6. Program Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pengaturan Lalu-Lintas**

- Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dan papan nama jalan
- Pengadaan dan pemasangan traffic light
- Rehabilitasi/pemeliharaan terminal

**7. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

- Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

**Komunikasi Dan Informatika :**

**8. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**

- Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi
- Pengadaan alat studio dan komunikasi
- Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi
- Pembinaan dan pengawasan usaha TV Kabel dan Radio-radio swasta
- Koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan pelayanan telekomunikasi
- Koordinasi pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat tingkat nasional

**9. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika**

- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

**10. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa**

- Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (KIM)
- Penyebarluasan informasi bagi masyarakat (Penerangan Keliling)
- Pelayanan sound system
- Koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan pelayanan informasi

**11. Program Pengembangan Jaringan Informasi Teknologi.**

- Pengembangan jaringan Teknologi Informasi (IT).

Berikut tabel mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas perhubungan Komunikasi dan Informasi Kab. Majene.

Tabel  
Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012-2016

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				<b>PERHUBUNGAN</b>																	
Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan yang representatif	Prasarana dan fasilitas perhubungan yang representatif	Terpenuhinya prasarana dan fasilitas perhubungan yang representatif		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang representatif		10%	143.950.000	15%	516.500.000	20%	567.000.000	25%	607.500.000	30%	648.000.000	100%	2.482.950.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Melaksanakan koordinasi untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Koordinasi untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Terlaksananya koordinasi untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Adanya koordinasi untuk pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan		-	-	15%	120.000.000	25%	150.000.000	30%	170.000.000	30%	190.000.000	100%	630.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Memelihara rambu lalu lintas dan papan nama jalan	Rambu lalu lintas dan papan nama jalan	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan		Rehabilitasi / pemeliharaan dan penggantian rambu dan papan nama jalan	Terpeliharanya rambu lalu lintas dan papan nama jalan		-	-	15%	65.000.000	25%	70.000.000	30%	75.000.000	30%	80.000.000	100%	290.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Memelihara traffic light dan warning light	Traffic light dan warning light	Terpeliharanya traffic light dan warning light		Rehabilitasi / pemeliharaan traffic light dan warning light	Terpeliharanya traffic light dan warning light		10%	138.000.000	15%	140.000.000	20%	145.000.000	25%	150.000.000	30%	155.000.000	100%	728.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Terlaksananya perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Data perencanaan sarana dan fasilitas perhubungan	Tersedianya data perencanaan sarana dan fasilitas perhubungan		Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Adanya dokumen data perencanaan sarana dan fasilitas perhubungan		10%	5.950.000	15%	6.500.000	20%	7.000.000	25%	7.500.000	30%	8.000.000	100%	34.950.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Menyusun kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang Perhubungan	Kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersedianya kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan		Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang Perhubungan	Adanya sebuah kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan		-	-	15%	125.000.000	25%	130.000.000	30%	135.000.000	30%	140.000.000	100%	530.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Mensosialisasikan kebijakan dan peraturan-peraturan bidang perhubungan	Sosialisasi kebijakan dan peraturan-peraturan bidang perhubungan	Tersosialisasikannya kebijakan dan peraturan-peraturan bidang perhubungan		Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Adanya sosialisasi kebijakan dan peraturan-peraturan bidang perhubungan		-	-	15%	60.000.000	25%	65.000.000	30%	70.000.000	30%	75.000.000	100%	270.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	



Mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah (PAD) sektor Perhubungan	Insentif penerimaan retribusi daerah (PAD) sektor Perhubungan	Optimalnya Insentif penerimaan retribusi daerah (PAD) sektor Perhubungan			Optimalisasi penerimaan retribusi daerah	Adanya insentif penerimaan retribusi daerah (PAD) sektor Perhubungan		10%	145.800.000	15%	385.000.000	20%	390.000.000	25%	400.000.000	30%	415.000.000	100%	1.735.800.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Melaksanakan pengawasan dan pengendalian LLAJ	Pengawasan dan pengendalian LLAJ	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian LLAJ			Pengawasan dan pengendalian LLAJ	Adanya pengawasan dan pengendalian LLAJ		10%	207.000.000	15%	360.000.000	20%	365.000.000	25%	370.000.000	30%	375.000.000	100%	1.677.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Melaksanakan penanggulangan bencana dan bantuan SAR	Sumber daya dan sarana untuk penanggulangan bencana dan bantuan SAR	Tersedianya sumber daya dan sarana untuk penanggulangan bencana dan bantuan SAR			Penanggulangan kecelakaan dan bantuan SAR	Adanya sumber daya dan sarana untuk penanggulangan bencana dan bantuan SAR		-	-	15%	450.000.000	25%	455.000.000	30%	460.000.000	30%	565.000.000	100%	1.930.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Melaksanakan pengawasan peralatan keamanan, keselamatan dan P3K angkutan kapal	Pengawasan peralatan keamanan, keselamatan dan P3K angkutan kapal	Terlaksananya pengawasan peralatan keamanan, keselamatan dan P3K angkutan kapal			Pengawasan peralatan keamanan dan keselamatan kapal	Adanya pengawasan peralatan keamanan, keselamatan dan P3K angkutan kapal		-	-	15%	50.000.000	25%	55.000.000	30%	60.000.000	30%	65.000.000	100%	230.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Meningkatkan SDM aparatur bidang Perhubungan	SDM aparatur bidang Perhubungan	Adanya SDM aparatur bidang Perhubungan			Peningkatan SDM aparatur bidang Perhubungan	Meningkatnya SDM aparatur bidang Perhubungan		-	-	15%	150.000.000	25%	160.000.000	30%	170.000.000	30%	180.000.000	100%	660.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
<b>Meningkatkan sarana dan prasarana Perhubungan yang representatif</b>	<b>Sarana dan prasarana Perhubungan yang representatif</b>	<b>Adanya sarana dan prasarana Perhubungan yang representatif</b>			<b>Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana Perhubungan yang representatif</b>		-	15%	2.240.000.000	25%	2.300.000.000	30%	2.360.000.000	30%	2.470.000.000	100%	9.370.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Pembangunan pelataran dan prasarana pendukung terminal regional Majene	Pelataran dan prasarana pendukung terminal regional Majene	Tersedianya pelataran dan prasarana pendukung terminal regional Majene			Pembangunan pelataran terminal induk Majene	Adanya pelataran dan prasarana pendukung terminal regional Majene		-	15%	1.900.000.000	25%	1.950.000.000	30%	2.000.000.000	30%	2.100.000.000	100%	7.950.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Menyediakan bus sekolah bagi pelajar	Bus sekolah bagi pelajar	Tersedianya bus sekolah bagi pelajar			Pengadaan bus sekolah	Adanya bus sekolah bagi pelajar		-	15%	340.000.000	25%	350.000.000	30%	360.000.000	30%	370.000.000	100%	1.420.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
<b>Membangun sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan Lantas yang representatif</b>	<b>Sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan Lantas yang representatif</b>	<b>Adanya sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan Lantas yang representatif</b>			<b>Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas</b>	<b>Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan Lantas yang representatif</b>		10%	280.565.500	15%	420.000.000	20%	435.000.000	25%	450.000.000	30%	465.000.000	100%	1.770.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Menyediakan pagar pengaman jalan yang representatif	Pagar pengaman jalan yang representatif	Tersedianya pagar pengaman jalan yang representatif			Pengadaan pagar pengaman jalan	Adanya pagar pengaman jalan yang representatif		10%	280.565.500	15%	285.000.000	20%	290.000.000	25%	295.000.000	30%	300.000.000	100%	1.450.565.500	Dishub kominfo	Kab. Majene
Menyediakan warning light yang representatif	Warning light yang representatif	Tersedianya warning light yang representatif			Pengadaan dan pemasangan warning light	Adanya warning light yang representatif		-	15%	60.000.000	25%	65.000.000	30%	70.000.000	30%	75.000.000	100%	270.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	
Menyediakan rambu pendahulu petunjuk jurusan yang representatif	Rambu pendahulu petunjuk jurusan yang representatif	Tersedianya rambu pendahulu petunjuk jurusan yang representatif			Pengadaan dan pemasangan rambu pendahulu petunjuk jurusan	Adanya rambu pendahulu petunjuk jurusan yang representatif		-	15%	75.000.000	25%	80.000.000	30%	85.000.000	30%	90.000.000	100%	330.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene	





Menyusun Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Data rencana pengembangan dan kebijakan bidang komunikasi dan informasi	Tersedianya data rencana pengembangan dan kebijakan bidang komunikasi dan informasi			Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Adanya dokumen data rencana pengembangan dan kebijakan bidang komunikasi dan informasi		-	15%	40.000.000	25%	45.000.000	30%	50.000.000	30%	55.000.000	100%	190.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Melaksanakan pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha TV kabel dan radio-radio dalam wilayah Kab. Majene	Pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha TV kabel dan radio-radio dalam wilayah Kab. Majene	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bagi pengusaha TV kabel dan radio-radio dalam wilayah Kab. Majene			Pembinaan dan pengawasan usaha TV Kabel dan Radio-radio swasta	Adanya pembinaan dan pengawasan bagi usaha-usaha TV kabel dan radio-radio dalam wilayah Kab. Majene	10%	18.150.000	15%	40.000.000	20%	45.000.000	25%	50.000.000	30%	55.000.000	100%	208.150.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Melaksanakan koordinasi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat	Koordinasi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat	Terlaksananya koordinasi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat			Koordinasi dan konsultasi dalam peningkatan pelayanan telekomunikasi	Adanya koordinasi untuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat	10%	15.000.000	15%	60.000.000	20%	65.000.000	25%	75.000.000	30%	85.000.000	100%	300.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene Luar Majene
Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat Tk. Nasional	Koordinasi penyelenggaraan pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat Tk. Nasional	Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat Tk. Nasional			Koordinasi pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat tingkat nasional	Adanya koordinasi penyelenggaraan pekan informasi dan apresiasi pertunjukan rakyat Tk. Nasional	10%	15.000.000	15%	70.000.000	20%	75.000.000	25%	80.000.000	30%	85.000.000	100%	325.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene Luar Majene
<b>Meningkatkan SDM di bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>SDM di bidang komunikasi dan informasi</b>	<b>Tersedianya SDM di bidang komunikasi dan informasi</b>			<b>Program Peningkatan SDM di Bidang Komunikasi dan Informasi</b>	<b>Meningkatnya SDM di bidang komunikasi dan informasi</b>			15%	55.000.000	25%	60.000.000	30%	65.000.000	30%	70.000.000	100%	250.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene Luar Majene
Melaksanakan Pendidikan dan pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informasi bagi aparat	Pendidikan dan pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informasi bagi aparat	Adanya pendidikan dan Pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informasi bagi aparat			Peningkatan SDM di bidang komunikasi dan informasi	Adanya pendidikan dan pelatihan SDM di bidang komunikasi dan informasi bagi aparat		-	15%	55.000.000	25%	60.000.000	30%	65.000.000	30%	70.000.000	100%	250.000.000	Dishub kominfo	Kab. Majene Luar Majene
<b>Meningkatkan kerjasama informasi dan media massa</b>	<b>Kerjasama informasi dan media massa</b>	<b>Adanya kerjasama informasi dan media massa</b>			<b>Program Kerjasama Informasi dan Media Massa</b>	<b>Meningkatnya peran media massa dalam dokumentasi dan penyebarluasan hasil pembangunan</b>	10%	36.900.000	15%	240.000.000	20%	260.000.000	25%	285.000.000	30%	310.000.000	100%	1.131.900.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Menyebarkan informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat	Informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat	Tersedianya Informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat			Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat (KIM)	Adanya informasi yang bersifat penyuluhan kepada masyarakat	10%	12.300.000	15%	70.000.000	20%	75.000.000	25%	80.000.000	30%	85.000.000	100%	322.300.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Menyebarkan informasi umum yang ditujukan kepada masyarakat	Informasi umum yang ditujukan kepada masyarakat	Tersedianya Informasi umum yang ditujukan kepada masyarakat			Penyebarluasan informasi bagi masyarakat (Penerangan Keliling)	Adanya informasi umum yang ditujukan kepada masyarakat	10%	10.350.000	15%	60.000.000	20%	65.000.000	25%	70.000.000	30%	75.000.000	100%	280.350.000	Dishub kominfo	Kab. Majene
Melaksanakan pelayanan sound system bagi	Pelayanan sound system bagi	Tersedianya Pelayanan sound			Pelayanan sound system	Adanya pelayanan sound system bagi	10%	14.250.000	15%	60.000.000	20%	65.000.000	25%	75.000.000	30%	85.000.000	100%	299.250.000	Dishub kominfo	Kab. Majene



**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU**  
**PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Indikator Kinerja SKPD Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majene dapat diketahui dengan cara menganalisis Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Majene Tahun 2012-2016.

Tabel  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja  
Dinas Perhubungan Komunikasi & Informatika  
Kab. Majene Tahun 2012-2016

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4.
1.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintahan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Pengembangan kapabilitas PNS melalui jenjang pendidikan formal dan non formal.</li> <li>❖ Peningkatan kinerja aparatur melalui penerapan sanksi dan penghargaan.</li> <li>❖ Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan melalui diklat struktural dan fungsional secara berjenjang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya SDM Aparatur Pemerintah Bidang Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</li> <li>❖ Meningkatnya SDM Aparatur Penegak Hukum di Bidang Transportasi Darat.</li> </ul>
2.	Peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui stabilitas politik dan keamanan yang kondusif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dan profesionalisme aparat penegak hukum.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terlaksananya pagelaran seni budaya daerah.</li> </ul>
3.	Terlaksananya penerapan nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Lestarnya nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal dalam pembangunan daerah.</li> <li>❖ Pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan yang representatif.</li> <li>❖ Meningkatnya sarana dan prasarana Telekomunikasi dan Informatika yang representatif.</li> <li>❖ Meningkatnya pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi BTS (Base Transceiver Signal) melalui penerapan mekanisme dan prosedur perizinan dengan sistem insentif dan disinsentif.</li> </ul>
4.	Meningkatkan infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah yang memadai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terwujudnya pola dan struktur ruang Transportasi, Telekomunikasi dan Informatika yang sesuai dengan tata ruang wilayah</li> <li>❖ Tersedianya sarana-prasarana perhubungan yang representatif.</li> <li>❖ Tersedianya sarana-prasarana Telekomunikasi dan Informatika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyelenggarakan kerjasama antar SKPD dalam pengembangan upaya mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</li> </ul>
5.	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang melalui pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian SDA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.</li> <li>❖ Pengembangan upaya mitigasi bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, demokratis, bersih, efektif dan efisien.</li> </ul>
6.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang profesional, demokratis, bersih, efektif dan efisien.	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Tercapainya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan.</li> <li>❖ Terwujudnya tertib pengelolaan</li> </ul>	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
1	2	3	4.
		keuangan dan aset SKPD. ❖ Optimalisasi potensi dan pencapaian target pendapatan daerah. ❖ Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan secara periodik dan tepat waktu. ❖ Terwujudnya tertib pengelolaan arsip SKPD. ❖ Optimalisasi penegakan PERDA. ❖ Terselenggaranya sistem administrasi kepegawai yang profesional.	
7.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada seluruh sektor.	❖ Terwujudnya pelayanan prima melalui implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di instansi pemerintah. ❖ Tersedianya mekanisme pengaduan masyarakat. ❖ Tersedianya jaringan IT di setiap kecamatan. ❖ Terselenggaranya even seni, budaya, dan olahraga. ❖ Meningkatnya peran media massa dalam dokumentasi dan penyebarluasan hasil-hasil pembangunan. ❖ Menurunnya pelanggaran hukum dan penyakit masyarakat.	❖ Meningkatnya SDM aparatur sesuai dengan fungsinya. ❖ Meningkatnya kualitas pelayanan transportasi. ❖ Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas SKPD dan Kinerja aparatur. ❖ Meningkatnya pemanfaatan teknologi data dan informatika. ❖ Adanya pusat layanan pengaduan masyarakat. ❖ Adanya dokumen hasil survey indkes kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. ❖ Adanya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika. ❖ Adanya data base transportasi, telekomunikasi dan informatika. ❖ Meningkatnya mutu pelayanan transportasi, telekomunikasi dan informatika. ❖ Adanya sarana –prasarana IT. ❖ Diklat khusus SDM pengelola IT. ❖ Diklat khusus SDM petugas patroli. ❖ Diklat khusus SDM penguji kendaraan bermotot. ❖ Fasilitas standar dan kebersihan. ❖ Penambahan kapasitas kecepatan.
8.	Optimalisasi pemanfaatan, pengelolaan dan peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan, kehutana, peternakan, kelautan, perikanan sebagai salah satu upaya menurunkan angka kemiskinan.	❖ Optimalisasi peningkatan kualitas dan kuantitas produksi SDA dalam mendukung perekonomian daerah. ❖ Terlaksananya proses nilai tambah produk pertanian. ❖ Tersedianya komoditas unggulan daerah yang berdaya saing. ❖ Tersedianya jaringan pemasaran produk pertanian. ❖ Terwujudnya ketahanan pangan daerah. ❖ Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dan sumber daya energi alternatif. ❖ Pengembangan objek-objek pariwisata daerah.	Adanya bantuan operasional berupa kendaraan roda empat untuk mengangkut hasil sumber daya alam.
9.	Meningkatnya peran lembaga keuangan daerah dalam mendorong ekonomi kerakyatan dalam rangka mengurangi pengangguran.	❖ Penataan jalur transportasi dari dan ke pasar tradisional sebagai pusat perekonomian masyarakat.	Adanya rambu lalu lintas dan petugas patroli pengawasan tata tertib berlalulintas pada setiap pasar tradisional.

Tabel  
 Indikator Kinerja SKPD Dishubkominfo Kab. Majene  
 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
 Tahun 2012-2016

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>Perhubungan</b>							
1	Tersedianya prasarana dan fasilitas perhubungan yang representatif		143.950.000	516.500.000	567.000.000	607.500.000	648.000.000	2.482.950.000
2	Tersedianya prasarana dan fasilitas LLAJ yang representatif		-	650.000.000	747.500.000	859.625.000	988.568.750	3.245.693.750
3	Meningkatnya pelayanan transportasi kepada masyarakat dan menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas		1.972.687.000	3.245.000.000	3.410.000.000	3.580.000.000	3.855.000.000	16.062.687.000
4	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang representatif		-	2.240.000.000	2.300.000.000	2.360.000.000	2.470.000.000	9.370.000.000
5	Tersedianya sarana dan prasarana pengendalian dan pengamanan lalu lintas yang representatif		280.565.500	420.000.000	435.000.000	450.000.000	465.000.000	1.770.000.000
6	Tersedianya sarana dan prasarana pengaturan lalu lintas yang representatif		-	560.000.000	580.000.000	600.000.000	620.000.000	2.360.000.000

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2012	2013	2014	2015	2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7	Meningkatnya sarana dan prasarana kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor yang representatif		-	500.000.000	750.000.000	1.125.000.000	1.687.500.000	4.062.500.000
<b>Komunikasi &amp; Informatika</b>								
8	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat melalui implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di instansi pemerintahan		48.150.000	410.000.000	445.000.000	485.000.000	525.000.000	1.913.150.000
9	Meningkatnya SDM di bidang komunikasi dan informatika		-	55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000	250.000.000
10	Meningkatnya peran media massa dalam dokumentasi dan penyebaran hasil-hasil pembangunan		36.900.000	240.000.000	260.000.000	285.000.000	310.000.000	1.131.900.000
11	Tersedianya informasi teraktual yang diinginkan oleh masyarakat		-	650.000.000	747.500.000	859.625.000	988.568.750	3.245.693.750

## PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majene Tahun 2012 - 2016 ini merupakan dokumen yang akan digunakan sebagai pedoman / acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun kedepan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dunia usaha dalam kegiatan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Majene khususnya di bidang perhubungan, komunikasi dan Informatika sangat dipengaruhi oleh manajemen transportasi, komunikasi dan informasi. Karena merupakan suatu urat nadi bagi kehidupan dengan fungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat dan lembaga dunia usaha serta Pemerintah. Disamping itu sangat diperlukan perubahan sikap mental, disiplin dan profesionalisme dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan peningkatan koordinasi yang mantap.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).